



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LAKIP

Tahun 2022



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. POLEWALI MANDAR**



Kata Pengantar

10 Uji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga tugas –tugas Pemerintahan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi.

Sejalan dengan hasil tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasarannya telah ditetapkan dalam Rencana KerjaTahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Hasil pencapaian kinerja menyelenggarakan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan, maupun dalam inplementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan dan belum sesuai dengan harapan, olehnya itu kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan LAKIP ini sekaligus masukan dalam penyusunan LAKIP berikutnya.

Polewali, 13 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



ARIFIN HALIM, S.Sos.MSi

Pangkat : Pembina TK.I

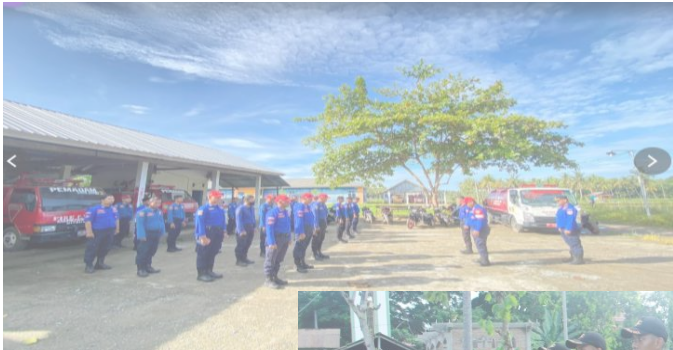
NIP : 19670319 200012 1 003

Daftar isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.2.. Dasar Hukum.....	3
1.1.3. Maksud dan Tujuan Pelaporan	4
1.2 Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.2.1 Kondisi Organisasi	5
1.2.1.1 Kondisi Kelembagaan	5
1.2.1.2 Kondisi Kepegawaian.....	8
1.2.1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang.....	12
1.2.2 Sistematika Penyajian.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis.....	22
2.1.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja	23
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	24
2.1.2.1 Tujuan	24
2.1.2.2 Sasaran	25
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2021	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	47
3.1. Akuntabilitas Kinerja	47
3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	48
3.1.1.1. Capaian Sasaran 1 Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	48

3.1.1.1.1 Indikator Kinerja 1 Sasaran Program 1 : Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	51
3.1.1.1.2 Indikator Kinerja 2 Sasaran Program 1 : Persentase Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman yang ditindaklanjuti	63
3.1.1.1.3 Indikator Kinerja 3 Sasaran Program 1 : Persentase Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi Dasar dan Tehnis.....	83
3.1.1.1.4 Indikator Kinerja 4 Sasaran Program 1 : Persentase kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai.....	88
3.1.1.2. Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran	91
3.1.1.3. Capaian Sasaran 3 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	97
3.1.1.3.1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah	97
3.1.1.3.2 Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	99
3.1.1.3.3 Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	100
3.2. Akuntabilitas Keuangan	108

BAB IV PENUTUP.....	114
4.1 Simpulan.....	114
4.2 Saran.....	115



Daftar tabel

Tabel 1.1	Berdasarkan Formasi Jabatan.....	8
Tabel 1.2	Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional Satpol PP Tahun 2022	9
Tabel 1.3	Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1.4	Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Satpol PP dan Damkar	10
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja menurut jenjang DiklatpinTahun 2022	11
Tabel1.6	Jumlah Satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti Bimtek dan Diklat Khusus	11
Tabel 1.7	Banyaknya Pegawai berdasarkan Gender	12
Tabel1.8	Sarana dan Prasarana	13
Tabel 1.9	Kartu Inventaris Barang	15
Tabel 1.2	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	26
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerjaserta Target Kinerja	38
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2022	43
Tabel 3.1	Optimalnya situasi dan Kondisi Ketentraman dan ketertiban umum Masyarakat	49
Tabel 3.2	Data Pelanggaran Perda Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022..	52
Tabel 3.3	Data Kasus Ketertiban , Ketentraman Dan Keindahan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2022	66
Tabel 3.4	Jumlah Aksi Unjuk Rasa aksi damai dan Kerusuhan Massa Tahun 2022..	74
Tabel 3.5	Data Unjuk Rasa Kab.Polewali Mandar 5 Tahun	80

Tabel 3.6	Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	83
Tabel 3.7	Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi Standar Kompetensi	86
Tabel 3.8	Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat	88
Tabel 3.9	Daftar Tenaga Satinmas yang telah dilatih dikabupaten	90
Tabel 3.10	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran ...	91
Tabel 3.11	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran wilayah kabupaten.....	92
Tabel 3.12	Tingkat Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK...	92
Tabel 3.13	Daftar Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	93
Tabel 3.14	Program Kegiatan UPTD Pemadam kebakaran Tahun 2022	96
Tabel 3.15	Capaian Indikator Program 3 Peredikat SAKIP Perangkat daerah	97
Tabel 3.16	Capaian Indikator Program 3 Perencanaan dan pelaporan Tahun 2021 dan 2022.....	98
Tabel 3.17	Capaian Indikator Program 3 Persentase Tertib Pengelolaan keuangan dana aset perangkat daerah	99
Tabel 3.18	capaian Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2021 dan Tahun 2022	99
Tabel 3.19	Capaian Indikator Program 3 Indeks Kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah	100
Tabel 3.20	Program Kegiatan Pelayanan Publik Tahun 2022	101
Tabel 3.21	Capaian Indikator Pelayanan Publik Tahun 2021 dan 2022	103
Tabel 3.22	Belanja Aparatur Tahun 2021.....	108
Tabel 3.23	Laporan Keuangan Satpol PP Tahun 2022.....	109

Daftar grafik

Grafik 1 Sistemika Penyajian Laporan akuntabilitas Kinerja Tahun 2022....	20
Grafik 2 Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	54
Grafik 3.Persentase kasus pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti	68
Grafik 4 Rasio pendistribusian Satpol PP terhadap jumlah Kecamatan	88

Lampiran

Lampiran I : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran III : Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Lampiran IV : Realisasi Anggaran Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dikarenakan adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan Good Governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan Good Governance ini diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam tiga pilar Tata Pemerintahan yang baik yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Kepentingan Umum, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengantisipasi perkembangan masyarakat yang dinamis, selaras dengan tuntutan era globalisasi dan Otonomi Daerah, maka kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di daerah. Karena itu tugas Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Umum praktis bertambah berat. Dalam kaitan ini keberadaan Satuan



Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dalam jajaran perangkat Pemerintah Daerah mempunyai arti yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Sejalan dengan dasar pola dan struktur organisasi yang baru, struktur organisasi dan nomenklatur baru dengan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan **Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten polewali mandar** termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan menyusun dasar / pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung program Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang harus dipertanggungjawabkan sebagai tolak ukur capaian kinerja yang merupakan penjabaran rencana strategis sebagai bentuk pelaksanaan keuangan berdasarkan **Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar** Fungsi Pemadam Kebakaran bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi UPTD Pemadam Kebakaran.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal 255 ayat (1) **Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja** dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dan semakin meningkatnya estalasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, dibuat pula Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan juga sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 tahun 1999 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LAKIP ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar secara menyeluruh. Sebagai wujud implementasi



akuntabilitas, maka dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024.

.Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diamanahkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Lembaga Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara menyeluruh.

1.1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat :

1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Polewali Mandar.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
15. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar .
16. Peraturan Bupati Polewali Mandar 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
17. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

1.1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN

Adapun Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja adalah meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta mewujudkan



manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sedangkan Tujuannya adalah sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1. KONDISI ORGANISASI

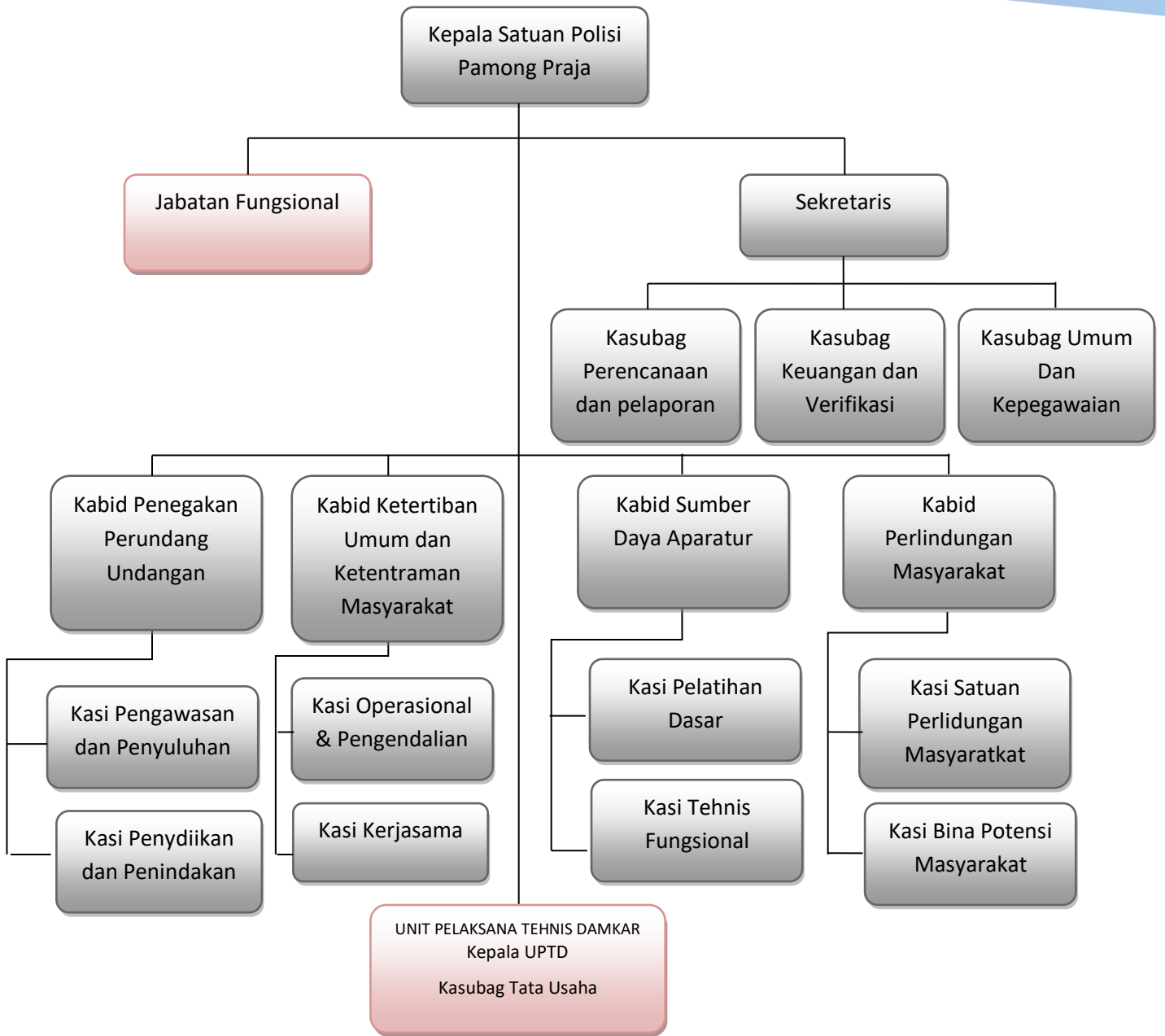
1.2.1.1 Kondisi Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi yang tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

- Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 12 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar , sebagai berikut :





Sebagaimana diatur Permendagri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Satpol PP terbagi atas :

1. Pol PP Keterampilan
 - Pol PP Pelaksana Pemula
 - Pol PP Pelaksana
 - Pol PP Pelaksana Lanjutan
 - Pol PP Penyelia
2. Pol PP Keahlian
 - Pol PP Pertama
 - Pol PP Muda
 - Pol PP Madya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar No. 44 Tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

➤ **Tugas pokok**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah .

➤ **Fungsi**

- Perumusan kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat ;
- Pelaksanaan kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat daerah lainnya.

Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama penyidik Pegawai Negeri Sipil SKPD terkait dengan kordinasi pihak Kepolisian sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.

1.2.1.2 Kondisi Kepegawaian

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan perangkat kerja yang mempunyai kompetensi pada bidang tugasnya masing-masing. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari PNS berdasarkan Jabatan , Tingkat Pendidikan, Pangkat, Golongan dan berdasarkan jenjang Diklatpim.

Tabel 1.1
Berdasarkan Formasi jabatan:

No	Tingkat Jabatan	Eselon	Ket
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II b	
2.	Sekretaris	III a	
3.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	IIIb	
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	IIIb	
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	IIIb	
6.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	IIIb	
7.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	IVa	
8.	Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Verifikasi	IVa	
9.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	IVa	
10.	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	IVa	
11.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	IVa	
12.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	IVa	
13.	Kepala Seksi Kerjasama	IVa	
14.	Kepala Seksi Pelatihan Dasar	IVa	



15.	Kepala Seksi Satuan Linmas	IVa	
16.	Kepala Seksi Teknis Fungsional	IVa	
17.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	IVa	
18.	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	IVa	
19.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemadam Kebakaran	IVb	

Tabel 1.2

Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional Satpol PP Tahun 2022

NO	Nama Pegawai	NIP	Tipe Jabatan (JFU/JFT/Struktural)	Nama Jabatan	Eselon	Golongan	Pendidikan
1	ARIFIN HALIM, S.Sos, M.Si	196703192000121003	Struktural	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II.a	IV/C	S2
2	MUHAMMAD YASIN, S.Sos	196712311992031158	Struktural	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	III.a	IV/B	S1
3	MUHAMMAD WAIS HUSAIN	196512311986121023	Struktural	Kabid Trantibum dan Ketentraman Masyarakat	III.b	IV/A	SMA
4	Drs. MASDIH DJINI	196904011991031018	Struktural	Kabid Perlindungan Masyarakat	III.b	IV/A	S1
5	TANAWALI,S.IP,MM	197802072005021006	Struktural	Kabid Sumber Daya Aparatur	III.b	IV/A	S2
6	ANDI PUTRA IIP KUNENG SIPAKKARI	198702082006041003	Struktural	Kabid Penegakan Perundang undangan Daerah	III.b	III/D	S2
7	ABD. MAJID SYACHRIR, S.Sos	198310072005021002	Struktural	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	IV.a	III/d	S1
8	SLAMET, S.Sos	197805012002121005	Struktural	Kasubag Keuangan dan Verifikasi	IV.a	III/c	S1
9	HARNIATY,SE	198001032009012005	Struktural	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	III/c	S1
10	I S N A E N I, S. Sos	197004122002121009	Struktural	Kasi Kerjasama	IV.a	III/d	S1
11	RAHMAT, S. S.os	197112312002121027	Struktural	Kasi Operasi Pengendalian	IV.a	III/d	S1
12	MOCHAMMAD NUR SAFAAT, S.Sos	197504122002121009	Struktural	Kasi Teknis Fungsional	IV.a	III/d	S1
13	NUR ALAMSYAH, S.Sos	197710182002121009	Struktural	Kasi Pelatihan Dasar	IV.a	III/d	S1
14	Y U S U F, SH	197905162002121008	Struktural	Kasi Penyelidikan dan Penindakan	IV.a	III/d	S1
15	MUH.AMIN.S.IP	198303032009011025	Struktural	Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	IV.a	III/C	S1
16	AHMAD RASADA, S.Sos	198101312002121005	Struktural	Kasi Bina Potensi Masyarakat	IV.a	III/C	S1
17	H A S M A N, S.Sos	197301102006041020	Struktural	Kasi Satlinmas	IV.a	III/C	S1
18	J M R A N, S.IP	198207182009011007	Struktural	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	IV.a	III/C	S2
19	M. TASHIR RAIS, S.IP	197612122005021008	Struktural	Kasubag Tata Usha Damkar	IV.b	III/d	S1
20	DEDY MACHMUD, S.Sos	197903112002121009	Fungsional	Pol PP Ahli Pertama		III/B	S1
21	SYAHARUDDIN	197702122005021004	Fungsional	Pol PP Ahli Pertama		III/B	S1
22	DJANIAR, S.Sos	196809212002122004	Fungsional	Pol PP Ahli Muda		III/C	S1
23	F A D L I	197112122009011008	Fungsional	Pol PP Ahli Pertama		III/B	S1
24	ABD. RAHMAN, S.IP	197212312009011024	Fungsional	Pol PP Ahli Pertama		III/B	S1
25	AMIRULLAH, S.Hi	197412252009011004	Fungsional	Pol PP Ahli Pertama		III/B	S1
26	JASWAT YUSUF, S.IP	197905072008011028	Fungsional	Pol PP Ahli Pertama		III/B	S1
27	M. SOFIAN IDRUS, A.Md	197312202006041019	Fungsional	Pol PP Mahir		III/A	D3
28	MUHAMMAD RAIS.Z	198002242008011005	Fungsional	Pol PP Mahir		III/A	S1
29	HASANUDDIN	198410142010011001	Fungsional	Pol PP Terampil		II/C	SMA
30	JAMALUDDIN	197106152006041030	Fungsional	Pol PP Terampil		II/D	SMA
31	MUHAJIR	197103222009011003	Fungsional	Pol PP Terampil		II/D	SMA

abel 1.3

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Status Pegawai				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		Satpol PP	Damkar	Satpol PP	Damkar	
1	Pasca Sarjana (S2)	3	-	-	1	4



2	Sarjana (S1)	70	2	31	13	111
3	Diploma III	1	-	2	-	3
4	Diploma II	-	-	-	-	-
5	Diploma I	-	-	-	-	-
6	SLTA	37	-	94	77	215
7	SLTP	-	2	-	2	2
8	SD	-	-	-	-	-
JUMLAH		111	4	127	93	335

Tabel 1.4

Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Satpol PP dan Damkar

No.	Pangkat / Gol. Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama / IV e	-	-	-	
2	Pembina Utama Madya/IV d	-	-	-	
3	Pembina Utama Muda / IV c	.1	-	1	
4	Pembina Tk.I / IV b	-	-	-	
5	Pembina / IV a	.3	-	3	
6	Penata Tk. I / III d	.10	-	10	
7	Penata / III c	.42	3	45	
8	Penata Muda Tk.I / III b	.20	-	20	
9	Penata Muda / III a	.11	-	11	
10	Pengatur Tk.I / II d	22	-	22	
11	Pengatur / II c	6	-	6	
12	Pengatur Muda / II b	1	-	1	
13	Pengatur Muda / II a	1	-	1	
14	Juru Tk. I / I d	1	-	1	
15	Juru / I c	-	-	-	
16	Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-	
17	Juru Muda / I a	-	-	-	
18	Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP	104	17	121	



19	Pegawai Tidak Tetap (PTT) Damkar	90	3	93	
J U M L A H		312	23	335	

Tabel 1.5

Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja menurut Jenjang Diklatpim, Tahun 2022.

Satuan Unit	DIKLATPIM				Ket
	Belum Pernah	Pernah Diikuti			
		IV	III	II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Satuan Polisi Pamong Praja	16	1	1	-	-
Pemadam Kebakaran	2	-	-	-	-
Jumlah	18	1	1	-	-

Tabel 1.6

**Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
yang telah mengikuti Bimtek dan Diklat Khusus.**

Satuan Unit	PNS		PTT		Ket
	Telah Mengikuti	Belum Mengikuti	Telah Mengikuti	Belum Mengikuti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SATPOL PP					
Diklat Dasar Satpol PP	40	77	-	-	
Diklat Pembentukan PPNS	5	112	-	-	
Diklat Bela Negara	4	113	-	-	



Bimtek Peningkatan Kapasitas Satpol PP	117	-	110	11	
PEMADAM KEBAKARAN					
Bimtek Pemahaman Dasar Damkar	3	1	93	-	
Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas D	-	3	-	93	
Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas C	-	3	-	93	
Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas B	-	3	-	93	
Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas A	-	3	-	93	

Tabel 1.7

Banyaknya PNS dan PTT berdasarkan Gender.

Satuan Unit	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-Laki		Perempuan		
	PNS	PTT	PNS	PTT	
(1)	(2)		(3)		(4)
Satuan Polisi Pamong Praja	114		3	17	238
Pemadam Kebakaran	4	104 90	-	3	97
Jumlah	118	194	3	20	335

1.2.1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Kondisi sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:



Tabel 1.8
 Sarana dan Prasarana

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5
1	Mobil Operasional Satpol PP	3 Unit	3	
2	Tabung Gas	1	1	
3	Tangga Tali	1	1	
4	Pataka	1	1	
5	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1		1
6	Tenda (Tenda Kompi)	2		1
7	Tameng	59	30	29
8	Baju Dalmas	29		29
9	Lemari Buku Arsip Untuk	10	8	2
10	Meja Komputer	1	1	
11	Dispenser	2	1	1
12	Tanda Heli Ved	1		1
13	Lemari Es	1	1	
14	A.C. Split	5	3	2
15	Mesin Ketik Manual Portable	1		1
16	Televisi	3	2	1
17	P.C Unit	5	2	3
18	Meja Rapat	2		2
19	Unit Power Supply	1		1
20	Kursi Kerja	44	31	13
21	All Band Receiver	1		1
22	Meja Kerja	20	20	
23	Handy Cam	2		2
24	Handy Talky (HT)	12	2	10
25	Printer	8	4	4
26	Sepeda Motor	7	7	
27	Tripot Handy Cam	1	1	
28	Wireless	1		1
29	Megaphone	1	1	
30	Lighting Equipment	1	1	
31	Mobil	2	2	
32	Laptop	14	10	4
33	Hard Disk	1		1
34	Mesin Absensi	1		1



35	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2		2
36	Camera Video	1	1	
37	Layar Film/Projector	1	1	
38	Rak Piring Alumunium	1	1	
39	Gordyin/Kray	1	1	
40	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	2	
41	Alat Pemadam Kebakaran	1	1	
42	Treng Air/Tandon Air	1	1	
43	Pompa Kebakaran/Portable	1	1	
44	Nozle Tester	16	16	
45	Selang Pemadam Kebakaran	12	8	4
46	Kamera Digital	1		1
47	Perkakas Perbengkelan	2	2	
48	Modem Wireless	1		1
49	Pompa Air	3	3	
50	Tempat Tidur Vealbek (Damkar)	30	4	26
51	Sambungan Selang Pemadam Kebakaran	6	6	
52	Kursi Tamu	1	1	
53	Alat Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan (Multi Check)	1		1
54	Alat-Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan P3K	1		1
55	Mobil Tangki Air	5	5	
56	Compresor Gigi	1	1	
57	Crusible Penyaring	5	5	
58	Pesawat Telephone	1	1	
59	Tali Penolong Korban	9		9
60	Helm Dalmas	20		20
61	Snapping	9		9
62	Puntung	22		22
63	Papan Pengumuman	1	1	
64	Palu Sidang	1	1	
65	Kain Hijau	1	1	
66	Keyboard	1		1
67	Mouse	5	2	3
68	Loker 26 orang anggota pemadam	24		24
69	(Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan Tensi Meter Stoskop)	2		2



Tabel 1.9

KARTU INVENTARIS BARANG

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	13.2.05.002.005.009	Tabung Gas	000382	-/-		Besi	1982						Pembelian	600,00	Tabung Gas
1	13.2.01.003.012.017	Tangga Tali Pataka	000001	-			2006						Pembelian	900,00	Tali Induk Bendera
2	13.2.05.002.006.033	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	000222	-/-			2006						Pembelian	1.170,00	Pataka Tali Pembantu
3	13.2.09.002.001.011	Tenda	000494	-		Tali Kain	2006						Pembelian	500,00	Tenda Kompi
4	13.2.15.003.002.005		000219 s/d 000219	-/-			2006						Pembelian	17.940,00	
1	13.2.09.004.002.028	Tameng Tameng alat dalmas/alat dakhura lainnya (dst)	000252 s/d 000279	-/-		Piber Piber	2007						Pembelian	17.584,00	Tameng Tameng Baju Dalmas
2	13.2.09.004.002.028		000369 s/d 000370	-/-			2007						Pembelian	1256,00	
3	13.2.09.004.002.036		000280 s/d 000309	-/-			2007						Pembelian	37.680,00	
1	13.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000454 s/d 000455	-/-		Besi	2008						Pembelian	3.460,00	Lemari Arsip
1	13.2.05.001.004.002	Lemari Kayu Lemari Sorok Meja Komputer Alat Dapur lainnya alat-alat sandi lainnya (dst)	000169	-/-		Plastik Kayu	2009						Pembelian	2.500,00	Lemari
2	13.2.05.001.004.026		000457	-		Plastik	2009						Pembelian	700,00	Lemari Box File Meja
3	13.2.05.002.001.039		000217	-/-	Miyako / Miyako		2009						Pembelian	1.750,00	Komputer Dispenser
4	13.2.05.002.005.026		000492	-/-			2009						Pembelian	350,00	Tanda Heli Ved
5	13.2.06.002.007.020		000373	-/-			2009						Pembelian	750,00	
1	13.2.05.002.004.001	Lemari Es	000375	Panasonic /		Besi	2010						Pembelian	1500,00	Kulkas AC
2	13.2.05.002.004.004	A.C. Split	000376 s/d 000377	Panasonic /		Serbuk Kayu	2010						Pembelian	8.000,00	Lemari Arsip
3	13.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000459	Panasonic /			2010						Pembelian	1.000,00	
1	13.2.02.001.001.003	Station Wagon	000001	/ Toyota	4009		2011				DC9031C		PEMBELIAN	292.863,50	Dikuasai pihak lain -
2	13.2.05.001.001.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000161	Olinetti / Olinetti			2011						Pembelian	2.000,00	Wanomuyo Mesin
3	13.2.05.002.006.002	Televi	000385	Sharp / Sharp			2011						Pembelian	2.000,00	Ketik
4	13.2.10.001.002.001	P.C Unit	000484	Core i3 / Core i3			2011						Pembelian	5.000,00	Televi Komputer PC
1	13.2.05.002.001.008	Meja Rapat	000175 s/d 000176	-Meja Sidang /			2012						Pembelian	1.200,00	Meja Rapat AC
2	13.2.05.002.004.004	A.C. Split	000378 s/d 000379	-Meja Sidang /			2012						Pembelian	10.000,00	Power supply
3	13.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	000001	Air Conditioning			2012						Pembelian	1.800,00	Hibah Hibah
4	13.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain Kursi	000413	Unit / Air			2012						Pembelian	450,00	Kursi Kerja Pejabat
5	13.2.05.003.003.006	Kursi Pejabat Eselon IV	000154	Conditioning Unit			2012						Pembelian	1.700,00	Eselon IV
6	13.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya All Band	000200 s/d 000206	RT -V/C RG			2012						Pembelian	2.800,00	Kursi Kerja All band
7	13.2.06.003.023.021	Receiver	000001	-/	40 Ampere	Besi kawat	2012						Pembelian	4.780,00	Meja Kerja
8	13.2.08.001.056.081	Meja Kerja	000485 s/d 000491	-Kursi Kerja /		Besi kawat	2012						Pembelian	5.250,00	Meja Kerja
				-Kursi Kerja /		Besi kawat	2012						Pembelian	5.250,00	Meja Kerja
				-Kursi Kerja /		Besi kawat	2012						Pembelian	5.250,00	Meja Kerja
1	13.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu Kursi Putar Handy Cam	000423 s/d 000438	-			2013						Pembelian	7.500,00	Meja Kerja Kursi Putar Handy Cam
2	13.2.05.002.001.032	Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Kerja Pejabat lainnya Handy Talky (HT)	000169	-			2013						Pembelian	750,00	Handy Cam
3	13.2.05.002.006.048		000390	-			2013						Pembelian	4.875,00	Kursi Kerja Eselon 3
4	13.2.05.003.003.005		000449	-			2013						Pembelian	3.000,00	Kursi Kerja Eselon 4
5	13.2.05.003.003.006		000450 s/d 000453	-			2013						Pembelian	8.000,00	Kursi Kerja Handy
6	13.2.05.003.003.009	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000439 s/d 000448	futura			2013						Pembelian	5.500,00	Talky Printer
7	13.2.06.002.001.006		000471	-			2013						Pembelian	2.875,00	
8	13.2.10.002.003.003		000426	-			2013						Pembelian	800,00	
1	13.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000133	-		Besi piber piber	2014		MFFC 025SFEK0034 91	164FML2D004449	DC 6834 CY	L-02M2532	Pembelian	23.000,00	Motor Trail Double
2	13.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000465	Monstrac /MTR			2014						Pembelian	23.000,00	Pencatatan Motor Trail
3	13.2.03.002.003.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	000135	200X			2014						Pembelian	500,00	Monstrac
4	13.2.05.002.006.012	Wireless Megaphone Lighting	000386	-			2014						Pembelian	5.000,00	Tripot Handy Cam
5	13.2.05.002.006.013	Equipment	000387	-			2014						Pembelian	1.000,00	Wireless Microphone
6	13.2.08.008.015.005		000497	-			2014						Pembelian	500,00	Megaphone T.O.A
				-			2014						Pembelian	500,00	Vidio Lighting Handy Cam



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Polewali Mandar Tahun 2022

1	1.3.2.02.001.001.002	Jeep	000001	Toyota - Hilux	2500	Besi	2015	731616000-KDR-00007020	MROFR22G7EO788462	2KD-S390315	DC 8010 C		Pembelian	390.900,00	Plat DC 45 C Motor
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor Kursi Biasa	000134	-	-	-	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	17.948,60	Kursi Kerja fatura
3	1.3.2.05.002.001.033	Meja Kerja Pejabat Eselon IV Lap Top	000207 s/d 000216	futura / futura	-	-	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	5.000,00	Meja kerja 1 biro
4	1.3.2.05.003.001.006	-	000427 s/d 000428	-	-	-	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	2.000,00	Laptop asus slim 14
5	1.3.2.10.001.002.002	-	000420	-	-	-	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	5.000,00	-
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor Meja Kerja Kayu	000135	Honda Scoopy	108 CC	Besi	2016		MH1JFW114GK427400	JFW1E1435739	DC 6981 CW	M-10563348R	Pembelian	18.130,00	Sepeda Motor
2	1.3.2.05.002.001.002	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000439 s/d 000440	Active	1 Biro	Serbuk Kayu	2016						Pembelian	3.400,00	Meja Kerja
3	1.3.2.05.003.003.005	P.C Unit Lap Top Lap Top Hard Disk	000450 s/d 000451	Front Line Lenovo	14"	Besi/Gab us	2016						Pembelian	5.000,00	Kursi Kerja Eselon
4	1.3.2.10.001.002.001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000414	Asus / Core i5	14"	Fiber Fiber	2016						Pembelian	7.000,00	Komputer PC Laptop
5	1.3.2.10.001.002.002	-	000422	Asus / Core i3	14"	Fiber Fiber	2016						Pembelian	8.000,00	Laptop
6	1.3.2.10.001.002.002	-	000423	TOSHIBA / 1 TB	-	Fiber	2016						Pembelian	7.000,00	Harddisk Eksternal
7	1.3.2.10.002.001.012	-	000001	Canon / iP2770	-	-	2016						Pembelian	1.000,00	-
8	1.3.2.10.002.003.003	-	000001 s/d 000002	-	-	-	2016						Pembelian	2.000,00	-
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000466	HONDA /	124 CC	BENSIN	2017		MH1JFU110HK879060	JFU1E1882051	DC 6874 CU	M-04040247R	Pembelian	19.430,00	Sepeda Motor Matic
2	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004	E1F02N11M2 A/T.	-	-	2017						Pembelian	3.250,00	Vario 125
3	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000005	MATIC epson Canon / iP2770	-	-	2017						Pembelian	750,00	Printer Epson Printer canon
1	1.3.2.08.004.004.008	recorder display lainnya (dst)	000497	Epson / L-360	-	Fiber Fiber	2018						Pembelian	2.700,00	Ruang Sekertariat
2	1.3.2.08.004.004.008	recorder display lainnya (dst)	000498	Epson / L-405 asus	-	fiber	2018						Pembelian	3.300,00	Ruang Sekertariat
3	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000424	ASUS	-	Fiber	2018						Pembelian	9.500,00	dikuasai Oleh Pengurus Barang Darwis,S.IP
4	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000425	-	14 inci 14 Inchi	-	2018						Pembelian	9.500,00	dikuasai oleh Pembuat SPP /SPM Jaswat Yusuf, S.IP
1	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	000001	Toyota /	2494 cc	Besi fiber	2019		MROES8B84K0064978	2KD-D001604	DC 8089 CY	O-06950871R	Pembelian	268.551,00	Kendaraan operasional
2	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	000166	Hilux Pick	1 PK/ Puth	Fiber Fiber	2019						Pembelian	4.250,00	di Depan Ruang Kasat
3	1.3.2.05.002.004.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	000001 s/d 000002	UP 2,5 DSI Solution /	14 Inchi	Serbuk Kayu	2019						Pembelian	9.790,00	PoIPP
4	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	000001	X302-5	-	Fiber Fiber	2019						Pembelian	8.024,00	Ruang Sekertariat
5	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III Layer	000001	Panasonic	-	Fiber	2019						Pembelian	2.000,00	Digunakan Oleh
6	1.3.2.06.001.002.105	Film/Projector	000478 s/d 000481	Canon /	-	-	2019						Pembelian	7.000,00	Hasanuddin S.IP
7	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT) Lap Top	000426	1300 D	-	-	2019						Pembelian	6.000,00	Humas Satpol PP
8	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000427	activ / 1 Biro	-	-	2019						Pembelian	5.500,00	Dipakai oleh Kasi
9	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000427	Epson Boafeng ASUS / X441 MA / intel inside ASUS / X441 MA / intel inside	-	-	2019						Pembelian	5.500,00	Penyidikan Yusuf, S.Sos (Warna Merah Maron) Digunakan Oleh Nur Syafaat S.Sos Kasi Teknis Fungsional (warna Silver)
1	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	000170	-	0 Cm x 170 C	Kayu	2020						Pembelian	2.227,90	Lemari Arsip
2	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	000001 s/d 000002	Futura	-	Besi	2020						Pembelian	717,00	Satpol PP
3	1.3.2.05.002.005.015	Rak Piring Aluminium	000001	-	-	Besi/ aluminium	2020						Pembelian	500,00	Kursi Staf
4	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	000392	Sony / MC	-	Fiber	2020						Pembelian	15.750,00	Rak Piring
5	1.3.2.05.002.006.059	Gordyn/Kray	000001	-	30 Meter	Kain	2020						Pembelian	6.000,00	di Gunaan Kantor unbuk Keperluan Dokumentasi
6	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001	Frontline / Hitam	-	Besi dab Spon	2020						Pembelian	3.300,00	Ruangan Sekertariat dan Kepela SatpolPP diGunakan Oleh kepala satuan Polisi Pamong Praja Drs. Aco Djalaluddin AM, Ms
7	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	000482 s/d 000485	Alinco	-	Fiber	2020						Pembelian	10.000,00	di Gudang



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Polewali Mandar Tahun 2022

8	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	000486 s/d 000489		Rt RTG	RTG ic	Fiber dan aluminiu m	2020						Pembelian	16.000,00	Pesawat Radio dan antena
9	1.3.2.08.001.013.081	TV Monitor	000001		LG / Layer Datar	55 Inci	Fiber	2020						Pembelian	8.000,00	Di Ruangan Sekertariat
10	1.3.2.08.001.013.081	TV Monitor	000002		LG / Layer Datar	32 Inci	Fiber	2020						Pembelian	3.500,00	Digunakan di Ruangan Kepala Kantor SatpolPP
11	1.3.2.08.001.041.192	Personal Computer	000001		Lenovo / 330-20 AST	16 Inci	Fiber	2020						Pembelian	6.823,80	Digunakan oleh Warsiman S.Sos
12	1.3.2.08.001.041.192	Personal Computer	000002		Lenovo / 330-20 AST	16 Inci	Fiber	2020						Pembelian	6.823,80	Digunakan Oleh Imran S.IP
13	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000428		Asus / Core3	14 Inci	Fiber	2020						Pembelian	6.471,00	Di Gunakan oleh Muliady S.Sos
14	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000429		Asus / Core3	14 Inci	Fiber	2020						Pembelian	6.471,00	Digunakan Oleh Harniaty SE
15	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000430		Asus / Core3	14 Inci	Fiber	2020						Pembelian	6.471,00	digunakan Oleh arif
16	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000427		Epson / Hitam	Hitam	Fiber	2020						Pembelian	4.217,20	Jihad Pratama alam
17	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000428		LS190 Epson / L 120	Hitam	Fiber	2020						Pembelian	1.660,40	Digunakan di ruangan Sekertariat satpolPP diGunakan Di Ruangan Perundang Undangan Meja Imran S.IP
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000467		Vario / 150 cc		Besi kayu	2021	MH1KCS111FK061 286	51E-1061593	DC 6870 CW			Pembelian	25.890,00	digunakan oleh MAJID
2	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	000190 s/d 000191				besi	2021						Pembelian	1.648,00	SYAHRIR,S.Sos /
3	1.3.2.05.002.005.002	Kompur Gas (Alat Dapur)	000382		rinnai futura		besi dan kain (busa)	2021						Pembelian	332,00	kasubag Perencanaan dan pelaporan
4	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000001 s/d 000004				kayu	2021						Pembelian	2.200,00	Digunakan oleh kasubag. keuangan dan verifikasi slamet S.Sos
5	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000460		-	18 inchi	besi kayu	2021						Pembelian	1.800,00	digunakan oleh hasi
6	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000461		-	14 inchi	fiber fiber	2021						Pembelian	3.000,00	fungsiional moch. Nur Sabaat, S.Sos
7	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000462		- LG	18 inchi/ abu- a	fiber fiber	2021						Pembelian	1.800,00	
8	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit Lap Top	000485		lenovo / abu		fiber fiber	2021						Pembelian	5.463,70	
9	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000431		- abu		fiber	2021						Pembelian	11.456,70	
10	1.3.2.10.001.002.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000432		lenovo		fiber	2021						Pembelian	11.456,70	
11	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000429 s/d 000430		canon 1010		fiber	2021						Pembelian	3.320,80	
1	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	000001		/ Honda			2010						PEMBELIAN	1.000,00	UPTD Pemadam
1	1.3.2.05.002.005.011	Treng Air/Tandon Air Pompa Kebakaran/Portable	000001		/ -			2011						PEMBELIAN	21.000,00	Pengadaan Gorden
2	1.3.2.05.002.007.002	Kebakaran/Portable	000001		/ -			2011						PEMBELIAN	15.000,00	Mesin Pompa Alcom/UPTD Pemadam
1	1.3.2.08.001.010.014	Nozle Tester	000001		/ -			2012						PEMBELIAN	1.500,00	Nozzle (Monitor
2	1.3.2.08.001.010.014	Nozle Tester	000002		/ -			2012						PEMBELIAN	4.000,00	Penembak Air)/UPTD Pemadam Nozle (Cabang 2)/UPTD Pemadam
1	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	000012 s/d 000013		-			2013						PEMBELIAN	20.000,00	Selang Pemadam Kebakaran/UPTD Pemadam Kamera Digital
2	1.3.2.06.001.002.164	Alat Studio Video Lainnya	000001		- / -			2013						PEMBELIAN	3.000,00	
1	1.3.2.05.002.005.002	Kompur Gas (Alat Dapur)	000059		Rinnai / Rinnai			2015						PEMBELIAN	500,00	Kompur Gas/Minyak/UPT D Pemadam Perakas
2	1.3.2.08.001.042.002	Perkakas Modem	000001 s/d 000002		-			2015						PEMBELIAN	3.000,00	Perkakas
3	1.3.2.10.002.004.004	Perkakas Modem	000001		Bolt / Bolt			2015						PEMBELIAN	500,00	Perbengkelan Modem Wireless/UPTD Pemadam



1	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air Sepeda Motor Lemari Kaca	000001 s/d 000006	-	BESI	2016					best			Pembelian	96.000,00	APBD
2	1.3.2.02.001.004.001	Meja Kerja Kayu	000003	YAMAHA /	BESI	2016								Pembelian	25.973,50	APBD dimutasi ke
3	1.3.2.05.001.004.027	Meja Kerja Pejabat Eselon IV Kursi	000001	VISION	KACA/AL	2016								Pembelian	3.500,00	Damkar
4	1.3.2.05.002.001.002	Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Kerja	000001 s/d 000004	-	MINIUM	2016								Pembelian	5.600,00	APBD APBD APBD APBD
5	1.3.2.05.003.001.006	Pejabat lainnya Note Book	000001	-	KAYU KAYU	2016								Pembelian	2.500,00	APBD
6	1.3.2.05.003.003.006	Note Book	000001	-	KAYU BESI	2016								Pembelian	1.400,00	Dikuasai Oleh UPTD
7	1.3.2.05.003.003.009	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001 s/d 000004	-	FIBER	2016								Pembelian	2.000,00	Damkar
8	1.3.2.10.001.002.003	Air Conditioning (AC)	000001	HP / AC 004	FIBER FIBER	2016								Pembelian	7.000,00	A.n Rudini Abbas
9	1.3.2.10.001.002.003		000002	14 INCI	FIBER FIBER	2016								Pembelian	7.000,00	Dikuasai Oleh UPTD
10	1.3.2.10.002.003.003		000076	CI 3		2016								Pembelian	3.500,00	Damkar
11	1.3.2.15.004.005.006		000008	ASUS / A 445 LA EPSON / L 120 PANASONIC / 2 PK		2016								Pembelian	8.500,00	APBD APBD
1	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	000001 s/d 000030	-	Besi Kain	2017								Pembelian	21.000,00	Kebutuhan
																Kantor UPTD
																DAMKAR
																(Tempat Tidur
																Vealbek)
																Mobilier Lainnya
2	1.3.2.05.002.007.016	Alat Pembantu Kebakaran	000001	-	30 M 2,5"	2017								Pembelian	8.500,00	Kebutuhan
																Kantor UPTD
																Damkar
3	1.3.2.05.002.007.016	Alat Pembantu Kebakaran	000002	-	30 Meter 2,5"	2017								Pembelian	8.500,00	Kebutuhan
																Kantor UPTD
																Damkar
4	1.3.2.05.002.007.016	Alat Pembantu Kebakaran	000003 s/d 000004	-	30 Meter 1,5"	2017								Pembelian	16.000,00	Kebutuhan
																Kantor UPTD
																Damkar
5	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	000003 s/d 000005	-	2,5"	2017								Pembelian	3.000,00	Kebutuhan
																Kantor UPTD
																(Sambungan
																Selang
																Pemadam
																(Kebakaran) Alat
																Pemadam
																Kebakaran
																Lainnya
6	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	000006 s/d 000008	-	1,5"	2017								Pembelian	2.250,00	Kebutuhan
																Kantor UPTD
																DAMKAR
																(Sambungan
																Selang
																Pemadam
																(Kebakaran) Alat
																Pemadam
																Kebakaran
																Lainnya
7	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	000009 s/d 000011	-	-	2017								Pembelian	1.500,00	Kebutuhan
																Kantor UPTD
																DAMKAR (
																Nosel) Alat
																Pemadam
																Kebakaran
																Lainnya



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Polewali Mandar Tahun 2022

8	1.3.2.05.003.006.011	Kursi Tamu di Depan Ajudan	000001	-		Busa	2017							Pembelian	4.500,00	Kebutuhan Kantor	
9	1.3.2.07.002.005.025	Menteri/Gubernur/Bupati/Wa likota	000003	-			2017							Pembelian	850,00	UPTD Damkar (Kursi	
10	1.3.2.07.002.005.025	Alat Kesehatan Umum lainnya	000004	-			2017							Pembelian	900,00	Tamu) Kebutuhan Kantor UPTD DAMKAR (Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan Multi Check) Kebutuhan Kantor UPTD DAMKAR (Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan P3K)	
1	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air	000007	-		1 Set	Besi	2019		MHCNMR71HKJ10	B104935	DD 8678 XY		Pembelian	15.000,00	Terletak di Mobil	
2	1.3.2.02.001.006.006	Mobil Tangki Air	000001	-	izusu	1 Roll	Besi	2019		4935				Pembelian	409.200,00	Operasional Pemadam	
3	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	000001	-		1 Roll	Besi Besi	2019						Pembelian	1.500,00	Kebakaran/Operasional	
4	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	000002	-			Besi	2019						Pembelian	1.000,00	Pemadam Kebakaran/	
5	1.3.2.05.001.005.088	Alat Pembantu Kebakaran	000003	-			karet	2019						Pembelian	1.000,00	Mobil Pemadam Nossel	
6	1.3.2.05.002.007.016	Alat Pembantu Kebakaran Compressor	000001 s/d 000002	-			Karet Besi	2019						Pembelian	14.500,00	Pemadam Kebakaran	
7	1.3.2.05.002.007.016	Gigi	000005 s/d 000006	-			Besi	2019						Pembelian	5.000,00	Nossel / Alat Pemadam	
8	1.3.2.07.001.002.109	Crusible Penyaring	000001	-				2019						Pembelian	7.500,00	Kebakaran Nossel / Alat	
9	1.3.2.08.001.011.043		000001 s/d 000005	-				2019						Pembelian	5.000,00	Pemadam Kebakaran Selang Pemadam Kebakaran Selang Penyemprot Mesi kompresor Tabung Apar /Pemadam Kebakaran	
1	1.3.2.05.002.007.016	Alat Pembantu Kebakaran	000007 s/d 000008	-	30m/1,5	Karet		2020						Pembelian	10.000,00	Selang Alat Pemadam Kebakaran	
1	1.3.2.02.001.006.004	Mobil Pemadam Kebakaran Mobil	000001 s/d 000003	-	ISUZU ISUZU	Besi Besi		2021						Pembelian	1.798.500,00		
2	1.3.2.02.001.006.004	Pemadam Kebakaran	000004	-				2021						Pembelian	599.500,00	dimutasikan ke Kec. Tinambung	
1	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	000187	-	Biro / Biro			1984						Pembelian	268,00	Meja Tulis	
1	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	000468	- / -				2004						Pembelian	100,00	Pesawat Telephone	
1	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro Tameng	000188 s/d 000189	-	Biro / Biro	Kayu Piber		2005						Pembelian	560,00	Meja Tulis Tameng	
2	1.3.2.09.004.002.028		000045 s/d 000073	-				2005						Pembelian	5.618,75		
1	1.3.2.09.002.001.011	Target Drone (Simulasi Pesawat	000392 s/d 000401	- / -				2006						Pembelian	465,00	Tali Penolong Korban	
2	1.3.2.09.002.001.069	Sasaran Tembak Udara)	000075 s/d 000080	-				2006						Pembelian	2.285,16	Helim Dalmas Snapling	
3	1.3.2.09.004.002.036	Helim Teknik alat dalmas/alat dakhura lainnya (dst)	000402 s/d 000411	-		Alkali Besi		2006						Pembelian	351,00		
1	1.3.2.09.002.001.069	Helim Teknik Pentung	000325 s/d 000340	- / -				2007						Pembelian	6.093,73	Helim Dalmas Tongkat T	
2	1.3.2.09.002.002.008		000136 s/d 000158	-		Karet		2007						Pembelian	3.565,00		
1	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman Palu Sidang	000164	- / -				2010						Pembelian	50,00	Papan Data Pegawai	
2	1.3.2.05.002.006.042	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000398	- / -				2010						Pembelian	50,00	Palu Sidang Kain Hijau	
3	1.3.2.05.002.006.077		000412	- / -				2010						Pembelian	150,00		
1	1.3.2.10.002.003.009	Keyboard (Peralatan Personal	000001	-	e Smile M-	Fiber Fiber		2016						Pembelian	150,00	Keyboard Mouse	
2	1.3.2.10.002.003.018	Komputer) Peralatan Personal Komputer lainnya	000001 s/d 000005	-	tech			2016						Pembelian	500,00		
1	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	000007 s/d 000031	- / -				2012						PEMBELIAN	5.200,00	Loker 26 orang anggota pemadam/UPTD Pemadam	
1	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	000001	-	Miyako / Miyako			2015						PEMBELIAN	200,00	Dispenser/UPTD Pemadam	
1	1.3.2.07.002.005.025	Alat Kesehatan Umum lainnya	000001 s/d 000002	-				2017						Pembelian	550,00	Kebutuhan Kantor UPTD Damkar (Alat Farmasi Berupa Alat Kesehatan Tensi Meter Stoskop)	

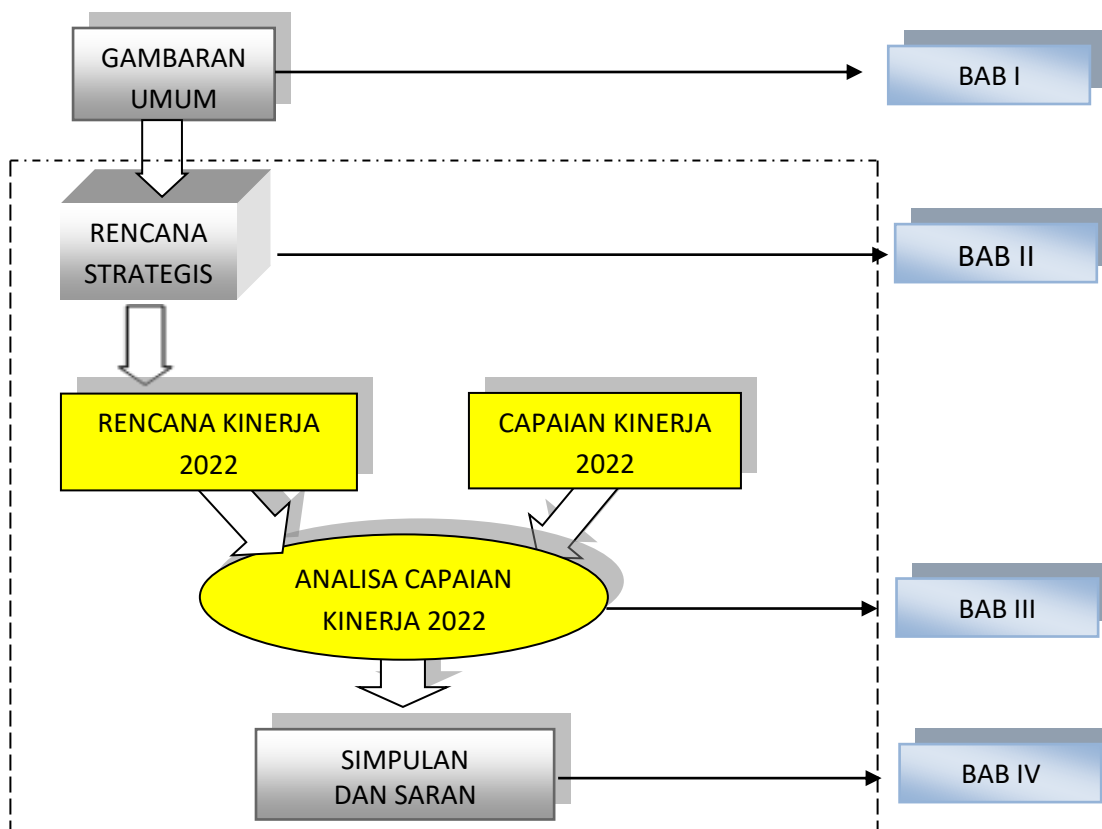


1.2.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2022, Capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan rencana kerja 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dimungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 dapat di ilustrasikan dalam bagan berikut :

Grafik 1

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022



Uraian singkat masing – masing Bab adalah sebagai berikut:

- BAB I Gambaran umum, menurut latar belakang penulisan LAKIP yang memuat penjelasan singkat tentang pentingnya ekuntabilitas , Dasar Hukum Penulisan Lakip, Maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP, Kedudukan tugas, pokok dan fungsi Kondisi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Sistimatika Pelaporan LAKIP Tahun 2022
- BAB II Rencana Strategis ,memuat penjelasan singkat tentang Renstra meliputi Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja utama, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022, Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan , Analisis Pencapaian Kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022, Uraian Informasi terkait akutabilitas Keuangan Satuan Kerja.
- BAB IV Penutup penjelasan kesimpulan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2022 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.



BAB II



2.1. RENCANA STRATEGI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai rencana strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Untuk itu diharapkan mempunyai andil yang cukup besar dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban di Daerah dengan bersifat proaktif dan ansipatif pada terwujudnya kesadaran masyarakat. Tuntutan atas kinerja merupakan suatu masalah serius yang dihadapi mengingat kualitas sumber daya manusia belum optimal untuk menyelesaikan segala permasalahan yang begitu kompleks dalam hal Penegakan Peraturan Daerah. Rencana Strategis tersebut disusun dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan konsep ini tidak bersifat statis melainkan dapat diubah sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis.

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan maksud menyatukan berbagai gagasan strategi dan memiliki orientasi terhadap masa depan di dukung dengan adanya Visi, Misi, Tujuan dan sasaran organisasi serta indikator target Kinerja.

2.1.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan RPJMD 2019 - 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Masuk pada Visi Bupati Polewali Mandar adalah “ **POLEWALI MANDAR MAJU RAKYAT SEJAHTERA** “

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024



Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Polewali mandar tersebut . maka dalam RPJMD ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :



Dari keempat Misi Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam Misi ke 4 yaitu :

“MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN”

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

2.1.2.1 Tujuan

Tujuan RPJMD tahun 2019 - 2024 adalah *Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern* Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis Sebagai penjabaran atau penerapan misi tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan RENSTRA yang ingin dicapai adalah :

“ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik “

Indikator dari tujuan diatas adalah Indeks Kepuasan masyarakat

1.1.2.2 Sasaran

Sasaran RPJMD tahun 2019 – 2024 adalah *“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik “* Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik maka ditetapkan 3 sasaran Renstra dan Target capaian Indikator antara lain :

1. Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

Indikator : Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali

2. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran

Indikator : Persentase kesiapsiagaan dan penanganan kejadian kebakaran memenuhi standar dan prosedur

3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Indikator :

- Predikat SAKIP Perangkat Daerah
- Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah
- Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Adapun visi, misi ,tujuan dan sasaran dapat kita lihat ditabel berikut ini :



Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

VISI	Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera										
	MISI	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Modern									
	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target							
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	Tujuan RPJMD : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern										
		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	62.18	63.1	71	75	81			
	Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik										
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik			
	Tujuan Renstra:										
	1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik									
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		
	Sasaran Renstra :										
	1.1.1	Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat									
			Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali	Persen	100	100	100	100	100		
Sasaran Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum											
1.1.1.1	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum										
		Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang telah	Persen	100	100	100	100	100			



					ditindaklanjuti							
					Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	1000	100	100	
					Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : - Dasar	Persen	100	100	100	100	100	
					Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : - Tehnis	Persen	13	16	16	16	20	
					Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	Persen	100	100	100	100	100	
Sasaran Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
				1.1.1.1.1	Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Gangguan	302	294	286	278	270
Sasaran Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan												
				1.1.1.1.1.1	Terkendalnya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil dilakukan deteksi dini dan cegah dini	Potensi	3	3	3	3	3
Sasaran Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa												
				1.1.1.1.1.2	Optimalnya 27indakan	Jumlah gangguan	Gangguan	302	294	286	278	270



					atas gangguan ketentraman dan ketertiban	ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani dengan baik								
					Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
				1.1.1.1.1.3	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam perlindungan masyarakat	jumlah kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	Kecamatan	1	-	1	1	1		
					Sasaran Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									
				1.1.1.1.1.4	Meningkatnya kapasitas perlindungan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang	30	-	20	20	20		
					Sasaran Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia									
				1.1.1.1.1.5	Meningkatnya kapasitas aparat Satpol PP	Jumlah Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP	Personil	120	30	30	40	30		
					Sasaran Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
				1.1.1.1.1.6	Optimalnya keterpaduan dalam penanganan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah potensi gangguan ketentraman dan ketertiban dalam Operasi Pekat Kerjasama TNI/ Polri	Potensi	3	-	3	3	3		
					Sasaran Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
				1.1.1.1.2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan daerah dan	Kasus	189	167	156	134	123		



						peraturan bupati yang ditindaklanjuti									
						Sasaran Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
					1.1.1.1.2.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah perda yang disosialisasikan	Perda	-	-	1	5	5		
						Sasaran Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
					1.1.1.1.2.2	Terkendalinya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah potensi Pelanggaran perda dan Perbup yang terawasi	Potensi	12	12	12	12	12		
						Sasaran Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
					1.1.1.1.2.3	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah kasus Pelanggaran Perda dan perbup yang disidik dan ditindaklanjuti	Kasus	189	167	156	134	123		
						Sasaran Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									
					1.1.1.1.3	Meningkatnya kapasitas PPNS	Jumlah ASN yang memenuhi kualifikasi PPNS	ASN	4	4	4	6	6		
						Sasaran Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									
					1.1.1.1.3.1	Meningkatnya Kapasitas PPNS	Jumlah Satpol PP yang mengikuti Diklat PPNS dan Peningkatan Kapasitas PPNS	Personel	-	-	4	1	4		
					Sasaran Renstra :										
					1.1.2	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran									
							Persentase kesiapsiagaan dan penanganan kejadian kebakaran memenuhi standar dan prosedur	Persen	100	100	100	100	100		
					Sasaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran										



		1.1.1.2	Meningkatnya kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran								
				Persentase kecamatan dengan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran memadai	Persen	94	94	94	94	100	
			Sasaran Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		1.1.1.2.1	Optimalnya manajemen kebakaran	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Kecamatan	14	14	15	15	16	
			Sasaran Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		1.1.1.2.1.1	Meningkatnya kapasitas layanan pemadam kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani sesuai standar prosedur penanganan kebakaran	Kejadian	73	23	22	20	18	
			Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelidung diri								
		1.1.1.2.1.2	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelidung diri yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelidung diri	Unit/ Paket	1	-	4	14	1	
			Sasaran Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran								
		1.1.1.2.1.3	Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta pelatihan Pemadam Kebakaran	Pegawai	-	-	-	30	30	
			Sasaran Renstra:								
		1.1.3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah								
				Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	



				Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	93,33	95,56	95,56	97,78	97,78
				Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Predikat	Baik	Baiik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
			Saran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		1.1.3.1	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran		Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Persen	90	100	100	100
					Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	Persen	92	96	96	96
					Persentase tertib keuangan perangkat daerah	Persen	95,56	95,56	95,56	97,78
					Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100
					Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	Persen	93,33	95,56	95,56	97,78
					Persentase tertib ketatausahaan kantor	Persen	70	75	80	85
					Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	Persen	70	75	80	85
					Persentase PNS	Persen	80	80	85	85



					perangkat daerah yang berkinerja baik							
					Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persen	65	70	75	80	85	
					Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran	Predikat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
				1.1.3.1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Persen	95,56	95,56	95,56	97,78	97,78
Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
				1.1.3.1.1.1	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjagannya	ASN	115	115	115	115	115
Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD												
				1.1.3.1.1.2	Meingkatnya Tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah	Jumlah SPM yang diterbitkan	Dokumen	130	130	130	130	130
Sasaran Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
				1.1.3.1.1.3	Meningkatnya Kalitas Penyusunan Laporan Prognosis Relisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	19	19	19	19	19
Sasaran Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
				1.1.3.1.2	Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persen	93,33	95,56	95,56	97,78	97,78



					Sasaran Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
				1.1.3.1.2.1	Meningkatnya tertib penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun	Dokumen	6	6	6	6	6
				Sasaran Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah								
				1.1.3.1.3	Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	75	80	85	85	90
				Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atributnya								
				1.1.3.1.3.1	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut yang tersedia	Paket	13	-	30	-	239
				Sasaran Sub Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai								
				1.1.3.1.3.2	Meningkatnya Kinerja Pegawai	Jumlah Pejabat Fungsional Satpol PP yang dinilai	Orang	2	2	12	12	12
				Sasaran Sub kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang undangan								
				1.1.3.1.3.3	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Tehnis	Kali	-	-	-	1	1
				Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				1.1.3.1.4	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	Persen	75	80	85	85	90
				Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								
				1.1.3.1.4.1	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik /penerangan	Jumlah Komponen Instalasi listrik /penerangan yang tersedia	Jenis	55	6	5	5	5
				Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
				1.1.3.1.4.2	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	37	34	34	34	34
				Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor								
				1.1.3.1.4.3	Terpenuhinya kebutuhan makan dan	Jumleh jenis makanan /minumna	Jenis	3	3	3	3	3



					minum	dan logistik satpol pp								
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
				1.1.3.1.4.4	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	3	
					Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
				1.1.3.1.4.5	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bulan	12	12	12	12	12	12	
					Sasaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD									
				1.1.3.1.4.6	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah	Dokumen	73	42	76	79	59		
					Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa Pemerintah Daerah									
				1.1.3.1.5	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	Persen	75	75	80	85	90		
					Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan									
				1.1.3.1.5.1	Terpehuninya kebutuhan Kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan dinas	Unit	1	-	1	-	2		
					Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Mebel									
				1.1.3.1.5.2	Terpenuhinya kebutuhan Mebeleur kantor	Jumlah Unit mebeleur	Unit	1	3	3	3	3		
					Sasaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya									
				1.1.3.1.5.3	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin kebutuhan kantor	Unit	8	13	14	8	8		
					Sasaran Sub Kegiatan Pngaadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya									
				1.1.3.1.5.4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasana pendukung gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	Jenis	-	6	3	2	2		



Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			1.1.3.1.6	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	Persen	75	75	80	85	90
Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			1.1.3.1.6.1	Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan	Jumlah Surat masuk dan keluar yang dikelola	Surat	352	352	352	352	352
Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			1.1.3.1.6.2	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Bulan	12	12	12	12	12
Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor											
			1.1.3.1.6.3	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Unit	11	11	11	11	11
Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			1.1.3.1.6.4	Terpenuhinya pembayaran Jasa tenaga bantu satpol pp	Jumlah jasa tenaga bantu yang terbayarkan	bulan	12	12	12	12	12
Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah											
			1.1.3.1.7	Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	Persen	77	77	77	80	80
Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan											
			1.1.3.1.7.1	Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendraan dinas yang terpelihara	Unit	4	4	4	11	11
Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau operasional											
			1.1.3.1.7.2	Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan	Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi	Unit	4	4	4	11	11



					operasional	Surat Izin									
Sasaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel															
				1.1.3.1.7.3	Terjaminnya kemanfaatan meleur	Jumah jenis mebeleur yang terpelihara	Jenis	-	-	7	5	5			
Sasaran Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya															
				1.1.3.1.7.4	Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor	Luar bangunan dan halaman kantoryang terpelihara	M2	504	504	504	504	504			
Sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
				1.1.3.1.8	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	95	95	96	97	100			
Sasaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah															
				1.1.3.1.8.1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja /perubahan renja tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1			
Sasaran sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD															
				1.1.3.1.8.2	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	3	3	3	3	3			
Sasaran sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD															
				1.1.3.1.8.3	Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu	Laporan	3	3	3	3	3			
Sasaran sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
				1.1.3.1.8.4	Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah hasil monitoring elvaluasi dan pelaporan kinerja	Laporan	2	2	2	3	3			



							yang tersusun						



2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

P

enetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari tiga Sasaran Strategis dan lima Indikator Kinerja Tiga Program dan sebelas kegiatan Tiga Puluh Enam Sub Kegiatan dengan Total Anggaran Rp15,042,011,872 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali	100 %	100%
2.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran	Persentase kesiapsiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran memenuhi standar dan prosedur	100 %	100 %
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B
		Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik

1. Sasaran Strategis Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali target 100 %, dengan rumus capaian adalah :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Potensi} \\
 \text{Gangguan Ketentraman} \\
 \text{dan Ketertiban umum} \\
 \text{masyarakat dapat} \\
 \text{diantisipasi dan} \\
 \text{terkendali}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban, keamanan dan} \\
 \text{ketentraman yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban, keamanan, dan} \\
 \text{ketentraman masyarakat yang teridentifikasi} \\
 \text{oleh SATPOL PP}}
 = X 100\%$$

Sasaran ini dilaksanakan oleh Empat Bidang pada di Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan satu program yaitu Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Jumlah Pagu Rp 482,220,200,- dengan Sasaran Program Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum Target Capaian Indikator antara Lain :



1. Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang telah ditindaklanjuti
2. Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti
3. Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi Dasar dan Tehnis
4. Persentase kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai

Program ini terdiri atas tiga Kegiatan dan sembilan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan

- Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Pagu anggaran Rp 55,831,800,-

- Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati /Walikota Pagu anggaran Rp19,720,200,-
- 2. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Pagu Anggaran Rp 36,111,600,-

- Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Pagu Anggaran Rp 8,000,000,-

- Sub Kegiatan : 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pagu anggaran Rp 8.000.000,- .

2. Bidang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota Pagu Anggaran Rp. 333.882.800,-

- Sub Kegiatan 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan , Pelaksanaan Patroli ,Pengamanan dan Pengawasan Pagu anggaran Rp 20,305,700,-

2. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan



unjuk rasa dan kerusuhan massa Jumlah Anggaran Rp 298,560,000,-

3. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tehnik pencegahan dan penanganan Gangguan ketentraman san ketertiban umum
Jumlah Anggaran Rp.15,017,100,-

3. Bidang Sumber Daya aparatur

- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota Pagu Anggaran Rp.54.742.300,-

Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlidungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak asasi Manusia Jumlah anggaran Rp 54,742,300,-

4. Bidang Perlidungan Masyarakat

- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota Pagu Anggaran Rp.29.763.300,-

Sub kegiatan : 1. Pemberdayaan Perlidungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Jumlah anggaran Rp 14,493,700.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlidungan masyarakat tingkat Kabupaten/ kota Jumlah anggaran Rp 15,269,600,-

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesipasiagaan dan Penanganan Kebakaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kesiapsiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran memenuhi standar dan prosedur Target 100% dengan rumus capaian target adalah :

$$\text{Persentase Kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran} = \frac{\text{Jumlah Kecamatan Yang dijangkau kesiapsiagaan bahaya kebakaran}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$$



Sasaran ini dilaksanakan oleh UPTD Pemadam Kabakaran terdiri dari 1 Program yaitu Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Pagu Rp 2,367,688,600,- pada satu Kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Pengendalian ,Pemadaman , Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota dengan Jumlah Anggaran Rp 2,367,688,600,- terdiri atas tiga Sub Kegiatan antara lain :

1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten kota Jumlah anggaran Rp 2,237,337,000,-
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan ,Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelindung diri Jumlah Anggaran Rp 93,465,600,-
 3. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Anggaran Rp 36,886,000,-
3. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :
1. **Predikat SAKIP Perangkat Daerah** target Capaian B Sasaran ini tergabung dalam satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 1 Kegiatan 4 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut
 1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp 14,408,100,-
 - a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2,147,800
 - b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD Rp 4,547,900,-
 - c. Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 4,399,900,-
 - d. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 3,312,500,-
 2. **Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah** target capaian 100% Sasaran ini tergabung dalam satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 1 Kegiatan 3 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp 9,459,653,072,-
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 9,456,549,472,-
 - b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD Rp 1,682,000,-



- c. Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi anggaran Pagu Anggaran Rp 1,421,600,-
3. **Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah** target Capaian Baik Sasaran ini tegabung dalam satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 1 Kegiatan 4 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut
 1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pagu Anggaran Rp 47,532,200,-
 - a. Sub Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Anggaran Rp 26,409,100,-
 - b. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan Rp21,123,100,-
 2. Kegiatan : Administarsi Umum Perangkat Daerah Pagu anggaran Rp 270,779,040,-
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 1,480,000,-
 - b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 12,860,140,-
 - c. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 42,282,000,-
 - d. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp 4,610,400,-
 - e. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan Rp. 4.440.000
 - f. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 205,106,500,-
 3. Kegiatan : Pengadaan Barang milik daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Anggaran Rp 34,165,800,-
 - a. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya Rp 32,023,200
 - b. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya Rp 2,142,600,-
 4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Pagu Anggaran Rp 2,207,823,460,-
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 1,138,000,-
 - b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp 13,285,460,-
 - c. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 15,400,000,-



- d. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 2,178,000,000
- 5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Pagu anggaran Rp 160,845,000,-
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pagu anggaran Rp 83,388,400,-
 - b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel Rp 904,800,-
 - c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya Rp 76,551,800,-

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan Eselon III dan Eselon IV :

Tabel 2.3

1. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perundang undangan dengan Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya penyuluhan	Jumlah penyuluhan	1 Kali	1 Kali
2.	Terlaksananya Pengawasan Tindak pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Pelanggar perda yang dibina dan diawasi	-	73 Kasus

2. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perundang undangan dengan Seksi Penyidikan dan Penyelidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati	Jumlah kasus Pelanggaran Perda dan perbup yang disidik dan ditindaklanjuti	53 Kasus	79 Kasus
2.	Meningkatnya Kapasitas PPNS	Jumlah Satpol PP yang mengikuti Diklat PPNS dan Peningkatan Kapasitas PPNS	-	4 Orang

3. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Seksi Operasional dan Pengendalian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terkendalinya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berhasil dilakukan deteksi dini dan cegah dini	12 Potensi	12 Potensi
2.	Optimalnya tindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban	Jumlah gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani dengan baik	84 Gangguan	84 Gangguan

4. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Seksi Kerjasama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalnya keterpaduan dalam penanganan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah potensi gangguan ketentraman dan ketertiban dalam Operasi Pekat Kerjasama TNI/ Polri	3 Potensi	3 Potensi



5. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Sumber Daya aparatur dengan Seksi Pelatihan Dasar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1.	Terlaksananya Dikdas dan Peningkatan Kapasitas Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Dikdas dan Peningkatan Kapasitas Satpol PP	30 Orang	30 Orang

6. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Sumber Daya aparatur dengan Seksi Tehnis Fungsional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1.	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional Satpol PP yang dinilai	12 Orang	30 Orang

7. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dengan Seksi Satlinmas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam perlindungan masyarakat	jumlah kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	14 Kecamatan	16 Kecamatan

8. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dengan Seksi Bina Potensi Masyarakat



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Peserta Pelatihan Perlindungan Masyarakat	-	20 Orang

9. Perjanjian Kinerja antar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dengan dengan UPTD Pemadam Kebakaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas layanan pemadam kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani sesuai standar prosedur penanganan kebakaran	22 Kejadian	20 Kejadian
2.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelidung diri yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelidung diri	-	14 Unit/Paket
3.	Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta pelatihan Pemadam Kebakaran	-	30 Pegawai



BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. Kedua regulasi tersebut diatas sebagai landasan normative digunakan sebagai dasar acuan dalam mengukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan yang mengolah kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yaitu data internal dan eksternal yang berasal dari luar instansi baik primer maupun data sekunder. Dalam pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Sejalan dengan uraian tersebut, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran, program / kegiatan serta indikator makro.



Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi dan analisa kinerja untuk hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kerja, dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai tidaknya kinerja yang diharapkan. Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat di bawah ini :

3.1.1.1. Capaian Sasaran 1 : Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

Indikator Kinerja 1 : Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali Target Capaian 100 %

Untuk meningkatkan ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat Secara keseluruhan sangat didukung dengan adanya Peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum kemudian di Ganti dengan peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta perlidungan masyarakat. Potensi gangguan ketentraman sebabkan dengan adanya situasi dan kondisi yang mengandung arti tidak bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikologi , sedangkan ketertiban umum disebabkan oleh adanya suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku yang dilanggar oleh orang dan atau badan hukum ,

Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban umum memiliki wewenang meliputi :



1. Mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum , budaya dan kearifan tradisi yang baik
2. Menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum dan ketentraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman masyarakat
3. Menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Menegakkan hukum secara adil , pasti, bermanfaat dan efektif.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum secara tehnik operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja meliputi kegiatan : Deteksi dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Patroli ,Pengamanan ,Pengawasan, Penertiban , Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa dilakukan melalui tahapan Perencanaan , Pelaksanaan dan Pelaporan .

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum satpol PP berkoordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah, Perangkat Daerah , Camat, Lurah /Kepala desa dan Ketua RW /RT atau Kepala Lingkungan .

Permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah Jumlah gangguan Ketentraman dan ketertiban umum di daerah dari tahun ketahun semakin meningkat sehingga Satpol PP menetapkan Tujuan dan Sasaran Indikator Renstra sebagaimana pada Sasaran pertama yaitu Optimalnya situasi dan Kondisi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dengan indikator Persentase Potensi Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali, Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat pada Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Optimalnya situasi dan Kondisi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Persentase Potensi Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali	Persen	100	100

Pencapaian Indikator diatas tercapai dengan beberapa kegiatan operasional Satpol PP seperti pelaksanaan Deteksi dan Cegah dini , Pembinaan dan Penyuluhan , Operasi Pekat, Patroli Wilayah



Ketentraman dan Ketertiban Umum , Penertiban dan Pengamanan Kegiatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti Tahun 2022}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibmas Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\frac{143 \text{ Gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti}}{143 \text{ Gangguan Trantibmas}} \times 100\% = 100\%$$

143 Gangguan Trantibmas

Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Indikator 1 :

Dalam pencapaian target kinerja indikator 1 terdapat beberapa hal yang menjadi yang menghambat dalam pencapaian target yaitu :

- Terdapat kasus pelanggaran K3 yang bukan kapasitas Satpol Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikannya seperti kasus tindak pidana umum yang mejadi kapasitas Kepolisian Negara.
- Kurangnya kordinasi antara intansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran K 3
- Kurangnya Dana Operasional penegakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum sehingga kegiatan operasional dilapangan terbatas
- Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Satpol PP belum ada
- Kurangnya koordinasi antar SKPD yang menjadi stake holder peraturan daerah
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku.
- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang ada sehingga masyarakat kurang mengerti dan paham akan Peraturan Daerah .
- Perbandingan Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk tidak seimbang
- Masih Banyak PNS Satpol PP yang belum mengikuti diklat Dasar yang diselenggarakan Kemendagri karena keterbatasan anggaran untuk mengirim personil
- Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingku Satpol PP
- Tidak adanya biaya Pengiriman Peserta Diklat bagi Pejabat Fungsional Satpol PP



- Anggota Satpol PP belum memahami Tugas dan Fungsinya di Kecamatan
- Belum terjalin komunikasi antara Anggota Satpol PP dengan Pihak Kecamatan dalam hal penegakan Perda dan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Solusi Faktor Penghambat Pencapaian Taarget Kinerja Indikator 1

Untuk mengantisipasi faktor penghambat pencapaian target kinerja Indikator 1 solusi yang dilakukan yaitu menyusun Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran Program adalah Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum dengan Capaian Indikator Program dibagi atas 4 Indikator antara lain :

1. Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang telah ditindaklanjuti
2. Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti
3. Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi Dasar dan Tehnis
4. Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai

Dari keempat indikator diatas dapat dibandingkan dengan melihat pencapaian dari tahun ketahun dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1.1 Indikator Kinerja 1 Sasaran Program 1 : Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti

Pencapaian Penangan kasus pada Indikator Program 1, Pelanggaran Perda sebanyak 1042 Kasus dan yang ditindaklanjuti adalah 1042 Kasus atau 100 % sebanyak 10 Jenis Perda yang ditargetkan 5 Jenis Perda dan capaian realisasi kinerja melebihi terget dengan rincian perda sebagai berikut :

1. Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang ketertiban umum sebanyak 102 kasus dan telah ditindaklanjuti sebanyak 102 Kasus capaian kinerja 100%,
2. Perda Nomor 13 Tahun 2006 Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebanyak 21 kasus dan telah ditindaklanjuti 21 Kasus capaian kinerjanya 100%
3. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 34 Kasus ditindaklanjuti 34 Kasus atau 100%



4. Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 823 kasus. Ditindaklanjuti 100 %
5. Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak sebanyak 6 Kasus ditindaklanjuti 6 Kasus capaian kinerja 100 %.
6. Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak sarang burung walet sebanyak 4 Kasus ditindaklanjuti 100 %
7. Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak hiburan sebanyak 1 Kasus ditindaklanjuti 1 Kasus atau 100 %
8. Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Parkir sebanyak 21 Kasus ditindaklanjuti 100%
9. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW sebanyak 28 Kasus ditindaklanjuti 100%
10. Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebanyak 2 Kasus ditindaklanjuti 100%

Tabel 3.2

Data Pelanggaran Peraturan daerah Kab.Polewali Mandar Tahun 2022

NO	JENIS PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		TOTAL			
		JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI		
1.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	4	14	14	14	14	17	17			6	6	8	8	23	23	15	15	1	1							102	102
2.	PERDA NOMOR 13 TAHUN 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol					6	6	6	6									9	9									21	21
3.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil															34	34											34	34
4.	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	428	428	201	201	146	146			4	4	22	22	2	2			19	19	1	1							823	823
5.	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak	2	2			4	4																					6	6
6.	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet									2	2							2	2									4	4
7.	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi																											0	0
8.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2008 Tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif																											0	0
9.	PERDA NOMOR 14 TAHUN 2007 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu																											0	0
10.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2009 Tentang Pendidikan Gratis																											0	0
11.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 Tentang Pajak Reklame																											0	0
12.	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2010 Tentang Pajak Restoran																											0	0
13.	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 Tentang Pajak Hotel																											0	0
14.	PERDA NOMOR 11 TAHUN 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan																											0	0
15.	PERDA NOMOR 12 TAHUN 2010 Tentang Pajak Hiburan	1	1																									1	1
16.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011 Tentang Bangunan Gedung																											0	0
17.	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2015 Tentang Pajak Parkir											21	21															21	21
18.	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan																											0	0
19.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2013 Tentang RTRW											11	11					17	17									28	28
20.	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2017 Tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan																	2	2									2	2
		435	435	215	215	170	170	23	23	6	6	60	60	10	10	59	59	62	62	2	2	0	0	0	0	0	0	1042	1042



Pencapaian kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagai berikut :

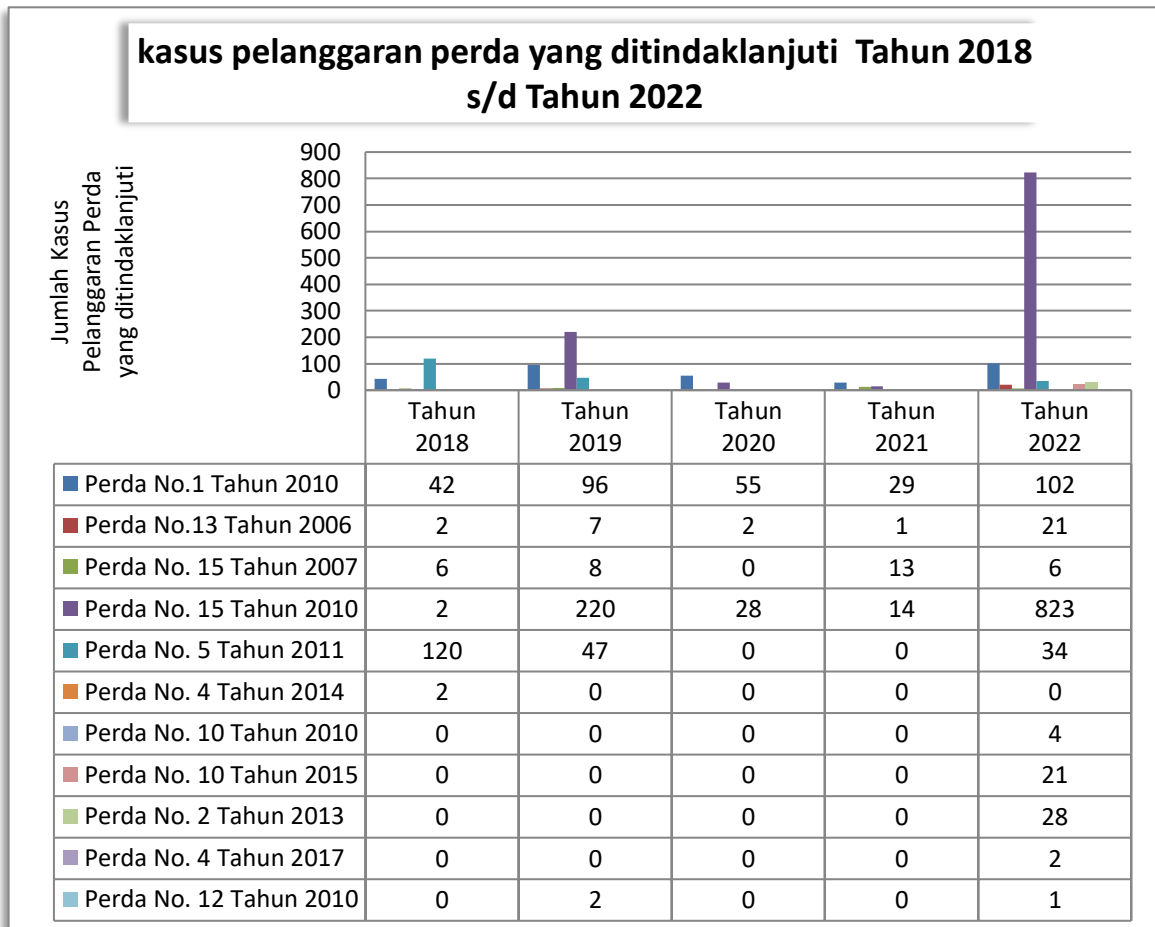
1. Tahun 2018 mengalami penurunan Jumlah Pelanggaran Perda sebanyak 206 Kasus yang ditindaklanjuti sebanyak 174 Kasus dengan capaian kinerja 84 %,
2. Tahun 2019 meningkat dengan jumlah Pelanggaran Perda sebanyak 380 Kasus ditindaklanjuti sebanyak 380 Kasus capaian kinerja 100 %
3. Tahun 2020 sangat menurun drastis Jumlah kasus 85 Kasus Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti yaitu sebanyak 85 dari 3 Jenis Perda dengan capaian kinerja 100%
4. Tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah Kasus 61 Kasus yang ditindaklanjuti sebanyak 57 Kasus atau 93 % capain kinerja.
5. Tahun 2022 mengalami Kenaikan dengan jumlah Kasus 1042 Kasus yang ditindaklanjuti sebanyak 1042 Kasus atau 100 % capain kinerja.

Dari data Pelanggaran Peraturan daerah 5 Tahun dapat dikategorikan bahwa masyarakat Kab. polewali mandar sebagian besar memahami dan sadar akan peraturan daerah yang berlaku di daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Dalam grafik dibawah ini :



Grafik 2. kasus pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti



Upaya Satuan Polisi Pamong praja dalam Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Perda dengan dilakukan beberapa Kegiatan seperti Operasi Yustisi ,Sosialisasi dan Pengawasan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah .

Adapun beberapa kasus pelanggaran Perda yang perlu penindakan khusus dengan Menyerahkan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kepada PPNS untuk dilakukan Proses Penyidikan.

1. Operasi Yustisi

Pelaksanaan Operasi Yustisi Tindak pidana Ringan Pelanggaran Peraturan Daerah Pasal 91 Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan pada Tanggal 2 Agustus 2022 di Depan Kantor BKPP Jl. Andi Depu dan pelaksanaan Sidang ditempat oleh Pengadilan Negeri Polewali dengan



melibatkan beberapa personel terdiri dari Unsur Satpol PP, Hakim Pengadilan Negeri Polewali , Kejaksaan , PPNS OPD terkait dan didampingi Korwas Polres Polman serta anggota Satlantas ,Kasat Shabara Polres Polman .

Sasaran kegiatan Operasi Yustisi berupa Masyarakat atau badan hukum yang bebergian tidak membawa KTP sebagai mana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Jumlah pelanggar yang terjaring atas pelanggaran ini sebanyak 34 orang, 34 Orang dilakukan proses pemeriksaan oleh PPNS kemudian berkas perkara di limpahkan ke Hakim Pengadilan Negeri untuk disidang di tempat dan diberikan sanksi denda .

Gambar 1.

Operasi Yustisi KTP



2. Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten polewali mandar dan Perbup nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar pada Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan memiliki tugas pokok melakukan Penyuluhan atau Sosialisasi Peraturan Daerah. Tahun 2022 pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati /Walikota satpol PP mensosialisasikan beberapa perda antara lain :

1. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak
2. Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan
3. Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang ketertiban umum

Dilaksanakan lima kali dalam kurung waktu satu tahun pada tahun 2022 , diwilayah Kec. Limboro, Kec.Tinambung , Kec. Balanipa , Kec.Matakali dan Kec. Wonomulyo , kegiatan ini dengan sasaran masyarakat setempat di lima kecamatan tersebut.

Kegiatan ini menurunkan tujuh orang personil di setiap kegiatan dari unsur Satpol PP , PPNS dan Pemerintah setempat (Pegawai Kecamatan/ Kelurahan atau Desa) , dilaksanakan Tahap 1 pada bulan April 2022, Tahap Kedua bulan Juni 2022, Tahap ketiga bulan September 2022 Tahap Ke empat bulan November, dan Terakhir dibulan Desember 2022.



Gambar. 2

Sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan dan Pernerbitan Ternak



A. Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum





Gambar 3.
Penertiban Pedagang Kaki Lima



Gambar 4.
Pedagang Kaki Lima Yang
Melanggar Menandatangani
Surat Pernyataan



Gambar 5.
Penertiban Penyakit
Masyarakat / Kos Kosan



Gambar 6.
Penertiban Anak Jalanan
(Anak Punk)



B. Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Gambar 7.
Penertiban Peredaran
Minuman beralkohol



Gambar 8.
Barang Bukti Miras yang
ditertibkan



Gambar 9.
Penyerahan Berkas Perkara
Kasus Miras Ke Pengadilan
Negeri , Pelaksanaan Sidang
Tipiring di Pengadilan Negeri
Polewali, dan Pemusnahan
Barang Bukti



C. Penegakan Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban ternak

Gambar 10.
Penertiban Ternak Yang Berkeliaran Tanpa dikembalikan Oleh Pemiliknya



Gambar 11.
Pemeriksaan Terhadap Pemilik ternak Yang Berkeliaran tanpa dikembalikan

D. Penegakan Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Gambar 12.
Pendataan / Pengawasan Bangunan yang tidak memiliki IMB



E. Penegakan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

Gambar 13.
Operasi Yustisi Perda Nomor 5 Tahun 2011
(Menjaring Masyarakat yang tidak membawa KTP)



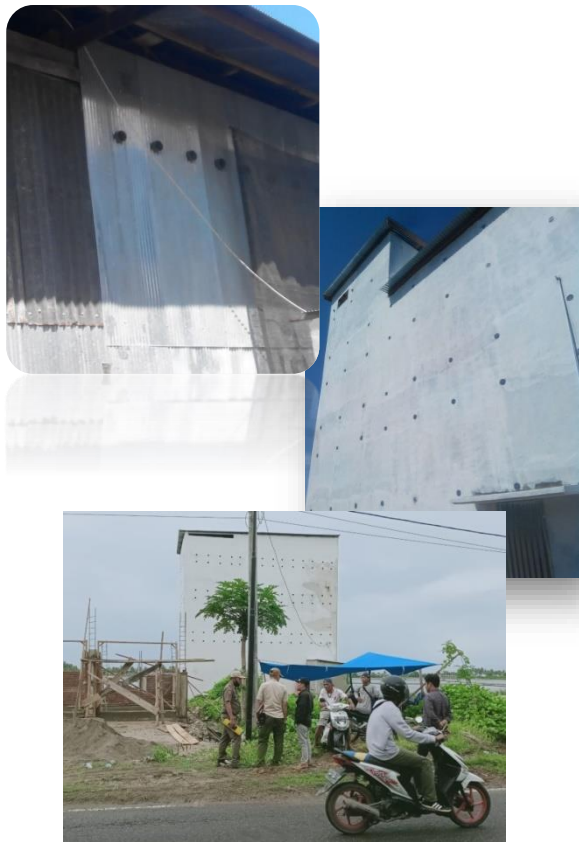
Gambar 14.
Pemeriksaan Oleh PPNS Terhadap
Masyarakat yang tidak membawa KTP



Gambar 15.
Proses Persidangan Tindak Pidana Ringan
(Operasi YustisiKTP)



F. Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet



Gambar 16.
Penertiban Sarang Burung Walet

3.1.1.1.2 Indikator Kinerja 2 Sasaran Program 1 Persentase Gangguan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman yang ditindaklanjuti

Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran, tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar mengenai aturan-aturan yang ada sehingga memakai fasilitas umum dalam melakukan perbuatan asusila contohnya : menggunakan tempat kost-kos'tan, stadion olah raga, TPI (Tempat Pelelangan Ikan) serta tempat-tempat umum lainnya untuk berbuat yang tidak sesuai dengan Peraturan, Etika, Norma Budaya dan Nilai-nilai Agama di Kabupaten Polewali Mandar

1. Operasi / Patroli Keamanan , Ketertiban dan Ketentraman masyarakat (K3) .

Pelaksanaan Patroli K3 ini adalah kegiatan pelaksanaan rutin bagi aparat Satuan Polisi Pamong praja yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan desember 2022 yang melibatkan sebanyak 6 s/d 10 orang aparat Satpol PP dalam satu kali kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah gangguan Ketertiban umum yang dikategorikan menjadi 10 kategori tertib antara lain :

1. Tertib Jalan dan angkutan jalan:
 2. Tertib Sosial
 3. Tertib lingkungan
 4. Tertib Jalur Hijau, Taman dan tempat Umum
 5. Tertib Sungai , drainase dan sumber air
 6. Tertib Usaha tertentu
 7. Tertib PKL
 8. Tertib reklame
 9. Tertib bangunan
 10. Tertib Ruang
1. Hasil Pelaksanaan Patroli K3 untuk tahun 2022 sebanyak 143 Kasus terdiri atas :
- a. Tertib PKL 51 Kasus di Tindak lanjuti semua 51 Kasus
 - Menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali.



- b. Tertib sosial 52 Kasus ditindaklanjuti 52 Kasus
 - Pelanggaran Penyalagunaan Lem Fox dan obat terlarang yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum 6 Kasus
 - Melakukan, menyuruh melakukan , membujuk , memfasilitasi dan atau memaksa seseorang untuk melakukan untuk berbuat asusila 16 Kasus
 - Melakukan kegiatan sebagai pengamen , pengemis, gelandangan pedagang asongan dan atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum 16 Kasus
 - Anak sekolah yang berkeliaran pada jam pelajaran berlangsung 5 kasus
 - Pesta Minuman Beralkohol yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum 9 kasus
- c. Tertib reklame 2 Kasus ditindaklanjuti 2 Kasus
 - Pemasangan Reklame pada bangunan titik titik yang tidaka sesuai dengan ketentuan kawsan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. Tertib Bangunan 30 Kasus ditindaklanjuti 30 Kasus
 - Bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan
- e. Tertib Usaha Tertentu 7 Kasus ditindaklanjuti 7 kasus
 - Penjualan Minuman Beralkohol tanpa Izin 2 Kasus
 - Penertiban Rumah Makan yang buka disiang hari selama bulan suci Ramadhan 5 Kasus
- f. Tertib Jalur Hijau taman dan tempat umum 1 Kasus ditindaklanjuti 1 Kasus
 - Melakukan kegiatan di trotoar , jalur hijau , taman atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.



Gambar 17.
Operasi Gangguan K 3



Tabel 3.3

DATA KASUS KETERTIBAN , KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN YANG DITINDAKLAJUTI TAHUN 2022

NO	JENIS PELANGGRAN K3	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		TOTAL		
		JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	JUMLAH	DITINDAK LANJUTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Tertib Jalan dan angkutan																									0	0	
2	Tertib Sosial			13	13	8	8	11	11							4	4	16	16								52	52
3	Tertib Lingkungan																									0	0	
4	Tertib Jalur Hijau , taman dan tempat umum																	1	1							1	1	
5	Tertib Sungai , drainase dan sumber air																									0	0	
6	Tertib Usaha tertentu							7	7																	7	7	
7	Tertib PKL	4	4	1	1	5	5	1	1			6	6	8	8	18	18	7	7	1	1					51	51	
8	Tertib Reklame					1	1									1	1									2	2	
9	Tertib bangunan					1	1			4	4	20	20	2	2			2	2	1	1					30	30	
10	Tertib ruang																									0	0	
	TOTAL	4	4	14	14	15	15	19	19	4	4	26	26	10	10	23	23	26	26	2	2	0	0	0	0	143	143	

Mencemati data Kasus Pelanggaran gangguan Ketertiban umum diatas dari bulan Januari sampai dengan Desember tiga bulan terakhir Oktober .November dan Desember tidak ada Pelanggaran Gangguan ketertiban Umum ini berdampak dari Pelaksanaan Patroli Gangguan Ketertiban umum yang dilakukan oleh aparat Satpol PP secara intensif , dan Pelaksanaan Patroli Gabungan Satpol PP ,TNI, dan Polri .

Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar sadar akan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum diubah Menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ketentrman dan ketertiban umum .



Untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan PPNS telah berhasil melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi mengawal Peraturan dan Daerah dan Peraturan Bupati . Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat pada beberapa Indikator Kinerja .

Persentase gangguan K 3 (Ketertiban, Keamanan dan Ketentraman) yang ditindak lanjuti sesuai standar prosedur.

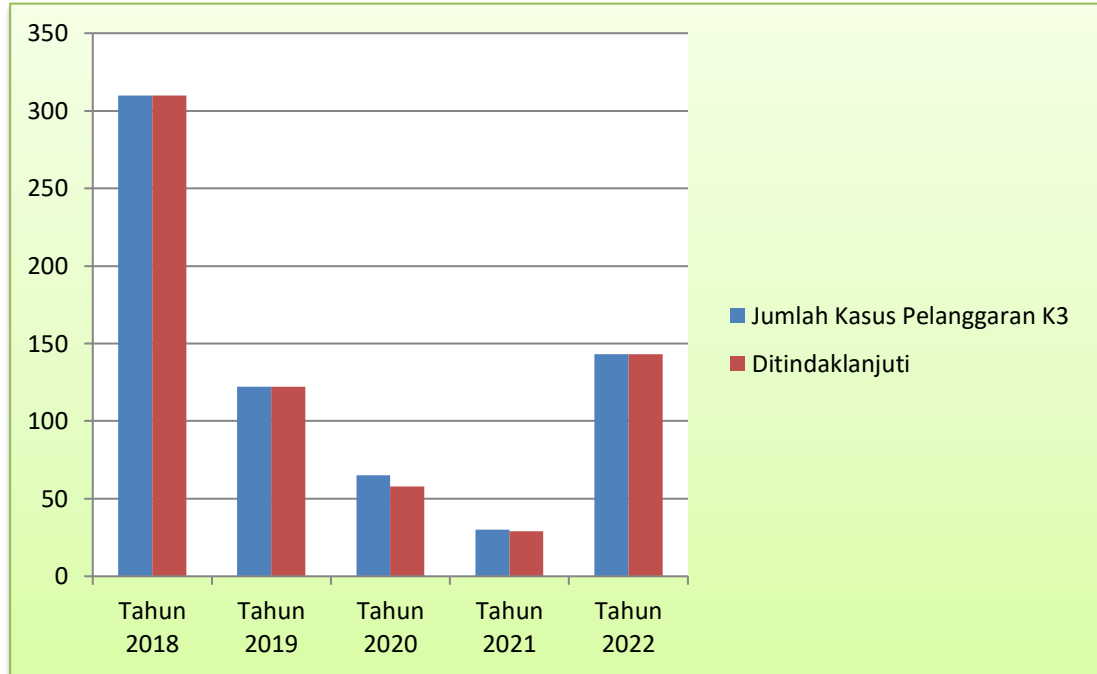
Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) meliputi : Penertiban Anak Sekolah, Penertiban Pedagang kaki Lima, Penertiban Baleho/Spanduk, Penertiban Kost-Kosan, Anak jalanan, dan Pengamanan. Kasus Pelanggaran Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk tahun 2015 Jumlah kasus 162 kasus yang terselesaikan 160 kasus atau 99 % sedangkan untuk tahun 2016 Jumlah Kasus mengalami peningkatan menjadi 180 kasus terselesaikan 180 kasus atau 100%, tahun 2017 Jumlah kasus K3 sebanyak 452 terselesaikan 100 % , tahun 2018 Jumlah kasus menurun sebanyak 310 Kasus terselesaikan 100 % , Tahun 2019 Jumlah Kasus 122 Kasus Terselesaikan 100% . Tahun 2020 Jumlah angka Kasus K3 berkurang dibandingkan jumlah Kasus K3 tahun sebelumnya,

Jumlah Kasus K3 Tahun 2021 berdasarkan Pengaduan masyarakat dan Temuan langsung Petugas dilapangan sebesar 30 Kasus dan ditangani 29 Kasus 96,67 % dikategorikan Penanganan Gangguan K3 cukup berhasil dan besarnya kesadaran Masyarakat dilihat dari Jumlah K3 Tahun 2020 sebesar 65 Kasus turun menjadi 30 Kasus ditahun 2021.

Jumlah Kasus K3 Tahun 2022 sebanyak 143 Kasus di tindaklanjuti semua 143 kasus atau 100% dari jumlah tersebut sebanyak 21 Kasus adalah sumber dari Pengaduan Masyarakat dan 122 Kasus temuan langsung Satpol PP diapangan.



Grafik.3 Persentase kasus Ketertiban, ketentraman dan keindahan yang ditindaklanjuti



untuk mencapai indicator 2 Sasaran Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota Pada sub Kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan , Pelaksanaan Patroli ,Pengamanan dan Pengawasan Pagu Anggaran Rp 20,305,700 realisasinya Rp 20,305,700 atau 100% . Indikator Kinerja Jumlah Pelaksanaan Patroli Target 12 Kali Capaian 12 Kali atau 100 %.
- (2) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Rp298,560,000 realisasinya Rp 298,275,600 atau 99,9%, Indikator Kinerja Jumlah Penanganan gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum Target 84 Kali capaian 143 Kali
- (3) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tehnik pencegahan dan penanganan Gangguan ketentraman san ketertiban umum Pagu anggaran Rp 15,017,100,- realisasi



Rp15,017,100 atau 100% indikator Kinerja Jumlah Pelaksanaan Operasi Pekat Kerjasama TNI/POLRI target 1 kali Capaian 1 Kali atau 100 %

Dengan direalisasikan Program kegiatan Prioritas Satpol PP Tahun 2022 pada 3 Sub Kegiatan untuk mencapai indikator Kinerja dapat dilihat dari beberapa output Kegiatan Satpol PP Kab. Polewali Mandar pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Patroli Wilayah Trantibum

Pelaksanaan Patoli wilayah Trantibum dilaksanakan rutin di wilayah Kecamatan Polewali dan Wonomulyo yang melibatkan 6 sampai 10 orang Personil

Pengawasan dan Patroli terhadap Personil Satpol PP yang bertugas dip Pos Penjagaan dilakukan oleh Petugas Internal Satpol PP (PTI) setiap hari dengan Jumlah PTI Satpol PP sebanyak 5 Orang

Gambar 18
Pengawasan oleh Petugas Tindak Internal



Gambar 19
Pengawasan dan Apel Pengecekan Pasukan



Gambar 20
Pelaksanaan Patroli Wilayah Trantibum



2. Penanganan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban umum

Pelaksanaan Pengamanan ,Penertiban dan Pengawasan adalah tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai mana diatur dalam Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis SOP Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan Penanganan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban umum Satpol PP membentuk beberapa unit yang melibatkan personil dalam pelaksanaan kegiatan diberikan tugas dan wewenang masing masing antara lain :

1. Petugas Pengendalian Masyarakat (DALMAS) 31 Orang Personil
2. Petugas Tindak Internal (PTI) 5 Orang Personil
3. Petugas Lidik 5 Orang Personil
4. Petugas Pengamanan Aset Pos Penjagaan Kantor Bupati ,Kantor DPRD , Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati ,Rujab Sekretaris Daerah dan Pos Alun Alun 93 Orang
5. Petugas Trantib Kecamatan 34 Orang Personil

Beberapa Aset Daerah seperti Kantor Bupati ,Kantor DPRD , Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati ,Rujab Sekretaris Daerah dilakukan Pengamanan 1 x 24 Jam secara bergantian oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan 93 Orang Personil Satpol PP.

Gambar 21
Dokumentasi Pengamanan di Setiap Pos dan Pengawasan oleh PTI Satpol PP



Pos 1 Kantor Bupati



Pos 2 Kantor Bupati (Dalmas)



Pos Rujab Wakil Bupati



Pos Rujab Bupati



Pos Rujab Sekretaris Daerah



Pos Kediaman Wakil Bupati



Pos Kantor DPRD

Selain Petugas Pengamanan Aset Daerah adapun Tim Dalmas Satpol PP yang melaksanakan Pengamanan ,Penertiban dan Pengawalan seperti Pengamanan Aksi Ujuk Rasa , Penertiban Gangguan K3, Pengamanan Kegiatan Acara Kabupaten dan Upacara Besar dan Pengawalan Pejabat dan Tamu VIP . disetiap Kegiatan di Tugaskan Anggota lidik untuk turun terlebih dahulu melakukan survei dilapangan kemudian memberikan laporan awal kondisi dan situasi dilapangan.

Jumlah Aksi Unjuk Rasa/ Aksi Damai dan Kerusuhan Massa Tahun 2022

Jumlah Aksi unjuk rasa tahun 2022 di wilayah Hukum Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2022 sebanyak 17 Aksi yang dilakukan oleh Unsur Masyarakat, Mahasiswa dan Beberapa Lembaga di beberapa titik dengan aksi Damai, berikut daftar aksi unjuk rasa Tahun 2022:

Tabel 3.4

NO	TANGGAL KEJADIAN	TEMPAT	NAMA/ORMAS,ALAMAT YANG MELAKUKAN UNJUK RASA	MAKSUD DAN TUJUAN	JUMLAH MASSA	AKSI		KET
						ANARKIS	DAMAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18 Maret 2022	Gedung DPRD	HMI Cab.Polman	Indikasi permainan dalam Proyek Tribun Panxcasila	15 Orang		x	Politik
2	29 Maret 2022	Kantor Bupati Polewali Mandar dan DPRD	Aliansi Masyarakat Wonomulyo	Penanganan Sampah di Wonomulyo	400 Orang		x	Politik
3	5 April 2022	Kantor Bupati Polewali Mandar	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Mendukung KPK memberantas Korupsi, Periksa Anggaran Covid 19	10 Orang		x	Politik
4	7 April 2022	Taman Sport Center	Aliansi Masyarakat Polman	Konsolidasi Akbar menuju 11 April menyala	40 Orang		x	Politik
5	11 April 2022	Stisip Biges Polman	Aliansi Masyarakat Polman	Teklap AUR serentak	40 Orang		x	Politik
6	11 April 2022	Kantor Bupati Polewali Mandar	Aliansi Masyarakat Polman	Mimbar Bebas menuju 11 April menyala	60 Orang		x	Politik



7	27 Mei 2022	Kantor DPMPTSP	Aliansi Masyarakat Peduli	Keberadaan Alfamidi (toko swalayan modern)	50 Orang		x	Ekonomi
8	13 Juli 2022	Kantor Bupati Polewali Mandar	Lembaga Mahasiswa alinasi PKM - PM	Mengecam Tindakan Represip Pencemaran Nama baik lembaga alinasi PKM	30 Orang		x	Politik
9	11 Agustus 2022	Kantor PTSP	Mahasiswa dan Masyarakat	Mengenai Pasar Modern yang ada di Kab.Polman agar pajak lebih diperketat	20 Orang		x	Ekonomi
10	30 Agustus 2022	Kantor DPRD	Mahasiswa PMII,Pemuda Pancasila, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ,Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi	Menuntut Kenaikan harga BBM	60 Orang		x	Ekonomi
11	2 September 2022	Kantor DPRD	Mahasiswa PMII,Pemuda Pancasila, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ,Liga Mahasiswa Nasional	Menuntut Kenaikan harga BBM	60 Orang		x	Ekonomi
12	5 September 2022	Kantor Bupati Polewali Mandar	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Menuntut Kenaikan harga BBM	40 Orang		x	Ekonomi
13	9 September 2022	Kantor DPRD	Himpunan Mahasiswa STISIP, PERMAHI, HMI, PEMUDA PANCASILA	Menuntut Kenaikan harga BBM	500 Orang		x	Ekonomi
14	15 September 2022	Kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Polewali	Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran	Menuntut Keadilan Pengawasan Anggaran Kab.Polewali Mandar	50 Orang		x	Ekonomi
15	20 September 2022	Dinas Kesehatan	Mahasiswa HMI	Menuntut untuk mencopot Kepala Puskesmas Campalagian	30 Orang		x	Ekonomi



16	21 September 2022	Puskesmas Camalaggian	Mahasiwa HMI	Menuntut untuk mencopot Kepala Puskesmas Campalagian	100 Orang		x	Ekonomi
17	21 September 2022	Kantor Bupati Polewali Mandar	Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran	Mendesak Bupati untuk mengevaluasi semua Kadis ASN, mengingat banyaknya dugaan Korupsi	50 Orang		x	Ekonomi

Gambar 22

FOTO DOKUMENTASI UNJUK RASA TAHUN 2022





3.				
4.				





Gambar 3.5

Data Unjuk Rasa Kab.Polewali Mandar

No.	Uraian	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bidang Politik	-	5	-	4	-	3	7
2	Ekonomi	-	1	16	1	-	2	10
3	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	1	-	-	-
Jumlah		0	6	16	6	-	5	17



3. Operasi Pekat

Pelaksanaan Operasi Pekat dilaksanakan rutin di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan melibatkan Unsur PPNS dan anggota Satpol PP , TNI, Polri dan OPD terkait

Pada Hari Sabtu Tanggal 2 April 2022 telah dilaksanakan Operasi Pekat yang melibatkan Satpol PP, PPNS Korwas PPNS, TNI dan Polri Sasaran kegiatan operasi pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat) berupa Penertiban Rumah Kos kosan, Penginapan, Hotel penjualan minuman beralkohol , narkoba, anak gelandangan, pengamen dan gangguan K3 Lainnya hasil dilapangan antara lain :

1. Ditemukan 6 Pasang mesum (belum pernah menikah) di Kos Kosan Kecamatan Wonomulyo dan Polewali .
2. Ditemukan 2 Pedagang menjual Minuman beralkohol Tanpa Izin di Kecamatan Polewali.

Tindak lanjut atas Pelanggar Ketertiban umum sebagaimana diatur Pada Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum berupa tindakan persuasif pembinaan seperti pemberian surat Teguran dan Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan.

Gambar 23.

Operasi Pekat (Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)



Gambar 24.
Proses Penindakan terhadap Pelanggar K3 ,Pasangan bukan Suami Isteri
(Proses Pemeriksaan dan Penandatanganan Surat pernyataan)



**3.1.1.1.3 Indikator Kinerja 3 Sasaran Program 1 : a. Persentase Satpol PP yang memiliki Kualifikasi (Dasar)
b. Persentase Satpol PP yang memiliki Kualifikasi (Tehnis)**

Tabel 3.6

Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1 Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : - Dasar - Tehnis	Persen Persen	74 3	34 7,6	34 7,6

Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Dasar :

Berdasarkan Capaian Indikator kinerja Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Dasar dari target 74 Persen yang terealisasi 34 % dapat uraikan sebagai berikut :

Jumlah anggota Satpol PP yang ada sebanyak 238 orang terdiri dari 117 PNS 121 orang Tenaga Bantu Satpol PP , sedangkan PNS yang telah memenuhi standar kompetensi dasar Satpol PP sebanyak 40 orang sehingga persentase capaian sebesar 34 % dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Satpol PP (PNS) yang telah memenuhi kualifikasi Dasar Satpol PP}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP Kab.Polewali Mandar (PNS)}} \times 100 \%$$

$$\frac{40 \text{ Orang}}{117 \text{ Orang}} \times 100\% = 34 \%$$

117 Orang

Persentase anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi Tehnis :

Berdasarkan Capaian Indikator kinerja Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Tehnis dari target 3 Persen yang terealisasi 7,6 % dapat uraikan sebagai berikut :



Jumlah PNS Satpol PP yang ada sebanyak 117 , sedangkan PNS yang telah kualifikasi Tehnis sebanyak 9 orang dengan rincian :

- Tehnis PPNS 5 Orang
- Tehnis Bela Negara 4 Orang

sehingga persentase capaian sebesar 7.6 % dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Satpol PP (PNS) yang telah memenuhi kualifikasi Tehnis}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP Kab.Polewali Mandar (PNS)}} \times 100 \%$$

$$\frac{9 \text{ Orang}}{117 \text{ Orang}} \times 100\% = 7,14 \%$$

117 Orang

Jumlah Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Satpol PP sebanyak 5 orang .

Satpol PP Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja .

Peraturan MenPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya bertujuan mendorong profesionalisme Polisi Pamong Praja untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kemendagri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Jafung Pol PP) melalui Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen BAK). Pasal 38 Peraturan MenPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2014 memberi kesempatan kepada Pol PP yang bertugas saat ini menjadi Jafung Pol PP melalui Inpassing atau penyesuaian dalam jabatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat ;
2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
3. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
4. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
7. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;



4. memiliki pengalaman dibidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
7. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Untuk menjadi Jafung Pol PP melalui inpassing maka setiap PNS Pol PP harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri telah menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional melalui Surat Edaran (SE) Mendagri No. 800/120/SJ tanggal 15 Januari 2016, yang memuat 18 unit kompetensi Tingkat Ahli dan 14 unit kompetensi Tingkat Terampil.

Uji kompetensi dilakukan oleh Asesor Kompetensi dengan menggunakan instrumen uji yaitu uji tertulis dan verifikasi dokumen portofolio yaitu setiap asesi (peserta uji kompetensi) harus membawa 2 (dua) bukti kerja berupa Surat Perintah dan Laporan untuk setiap unit kompetensi yang diujikan. Apabila hasil uji tertulis dibawah batas nilai minimum (60) maka asesi akan diberikan kesempatan mengikuti uji lisan (wawancara) sesuai dengan nilai unit kompetensi yang kurang pada uji tertulis.

Unit kompetensi yang diuji untuk asesi Jafung Pol PP Tingkat Ahli ada 5 (lima) unit kompetensi yaitu

1. melakukan koordinasi penegakan Perda;
2. melakukan tindakan non yustisi;
3. melakukan patroli;
4. melakukan pengendalian masa; dan
5. melakukan mobilisasi perlindungan masyarakat.

Untuk asesi Jafung Pol PP Tingkat Terampil ada 4 (empat) unit kompetensi yaitu:

1. melakukan tindakan non yustisi;
2. melakukan patroli;
3. melakukan pengendalian masa; dan
4. melakukan pendataan dan pelatihan perlindungan masyarakat.

Dari beberapa persyaratan memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional Satpol PP beberapa persyaratan telah dipenuhi anggota Satpol PP kab. Polewali Mandar dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 3.7
Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi Standar Kompetensi

Aspek	Jumlah
1. Pendidikan	
-SLTA	37
- DIPLOMA	1
- SI	70
- S2	3
2. Diklat	
- Diklat dasar Satpol PP	40
- Diklat PPNS	5
- Diklat Bela Negara	4
3. Pangkat /Gol Ruang	
- Pembina Utama Muda / IV c	.1
- Pembina Tk.I / IV b	-
- Pembina / IV a	.3
- Penata Tk. I / III d	.10
- Penata / III c	.41
- Penata Muda Tk.I / III b	.20
- Penata Muda / III a	.11
- Pengatur Tk.I / II d	22
- Pengatur / II c	6

Gambar 25 .
Bimtek Peningkatan Kapasitas Satpol PP Tahun 2022



**Gambar 26 .
Peningkatan Kapasitas Aparat Satpol PP (Pelatihan Huru Hara) Tahun 2022**



Rasio pendistribusian Satpol PP terhadap jumlah Kecamatan 1 : 1

Rasio pendistribusian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2016 adalah 1 : 1. Sedangkan pada tahun 2017 masih tetap 1 : 1 terhadap jumlah kecamatan. Pada Tahun 2018 dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, ada 16 anggota Satpol PP yang tugaskan di 13 Kecamatan (87,5%). Begitu juga dengan tahun 2015 dan 2016 masih tetap 13 kecamatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan, itupun penyebaran tersebut tidak merata 1 : 1 karena pertimbangan trend gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang berbeda. Sedangkan untuk tahun 2021 ditempatkan 16 kecamatan dengan jumlah personel Satpol PP sebanyak 34 orang Tahun 2022 Sebanyak 27 Orang personal yang ditempatkan di 15 Kecamatan.

Penyebaran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan tidak merata disesuaikan dengan tingkat kerawanan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk 4 kecamatan pelosok personel Satpol PP yang ditugas1 Orang 1 Kecamatan antara lain Kecamatan , Limboro, Tutar dan alu , Kecamatan Wonomulyo 2 orang Polewali 4 orang

Untuk lebih jelasnya tentang pendistribusian Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 4. Pendistribusian Satpol PP terhadap Jumlah Kecamatan



3.1.1.1.4 Indikator Kinerja 4 Sasaran Program 1 : Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnik yang memadai

Tabel 3.8

Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1 Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnik yang memadai	Persen	81	14 Kecamatan	87,5



Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Jumlah Kecamatan yang telah memiliki tenaga satlinmas yang mempunyai kualifikasi teknis yang memadai adalah 14 Kecamatan dapat dilihat pada tabel daftar tenaga Satlinmas yang telah dilatih di Kabupaten sebagai berikut :



Tabel 3.9

Daftar tenaga Satlinmas yang telah dilatih di Kabupaten

No.	Nama Peserta	Jenis Kelamin	UTUSAN	Alamat	Pelaksanaan		Penyelenggara
					Tempat	Waktu	
1	MARZUKI	L	KEC. POLEWALI	KEC. POLEWALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
2	SARBING	L	KEC. POLEWALI	KEC. POLEWALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
3	AFRAN	L	KEC. POLEWALI	KEC. POLEWALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
4	MASRIANTO	L	KEC. BINUANG	KEC. BINUANG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
5	EDI BIN PONRENG	L	KEC. BINUANG	KEC. BINUANG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
6	ASLAM	L	KEC. ANREAPI	KEC. ANREAPI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
7	SAPARUDDIN	L	KEC. ANREAPI	KEC. ANREAPI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
8	JUSSAM	L	KEC. BULO	KEC. BULO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
9	HAMRAN	L	KEC. BULO	KEC. BULO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
10	WILONO	L	KEC. WONOMULYO	KEC. WONOMULYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
11	BASIRUN	L	KEC. WONOMULYO	KEC. WONOMULYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
12	SHUBRI	L	KEC. MAPILLI	KEC. MAPILLI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
13	NAWIR	L	KEC. MAPILLI	KEC. MAPILLI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
14	NURSAHIDA	P	KEC. CAMPALAGIAN	KEC. CAMPALAGIAN	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
15	SUKRI	L	KEC. CAMPALAGIAN	KEC. CAMPALAGIAN	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
16	AL[L	KEC. TAPANGO	KEC. TAPANGO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
17	SUMARDI	L	KEC. TAPANGO	KEC. TAPANGO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
18	LU'DIN	L	LEC. LUYO	LEC. LUYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
19	HARI	L	KEC. LUYO	KEC. LUYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
20	SAPRIADI	L	KEC. ALU	KEC. ALU	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
21	MUHDAR	L	KEC. ALU	KEC. ALU	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
22	MUHAMMAD ASRUL	L	TINAMBUNG	TINAMBUNG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
23	SALEH SAYANG	L	KEC. TINAMBUNG	KEC. TINAMBUNG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
24	IBRAHIM SUAIB S.PD	L	KEC. BALANIPA	KEC. BALANIPA	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
25	NIRMA, SE.	L	KEC. BALANIPA	KEC. BALANIPA	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
26	MUSTAMIN	L	KEC. LIMBORO	KEC. LIMBORO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
27	SUPRIADI	L	KEC. LIMBORO	KEC. LIMBORO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
28	MUSLIMIN, A.	L	KEC. MATAKALI	KEC. MATAKALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
29	HASAN	L	KEC. MATAKALI	KEC. MATAKALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
30	MUHAJIR	L	KEC. MATAKALI	KEC. MATAKALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP

Jumlah Kecamatan yang Mengutus Tenaga Satlinmas pelatihan x 100%

Jumlah Kecamatan

14 Kecamatan 100% = 87,5 %

16 Kecamatan



Perbandingan Tenaga satuan Perlindungan Masyarakat ditingkat Dusun adalah 1 Dusun 1 Orang anggota Linmas

Dengan Jumlah tenaga Satlinmas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah 2454 orang Sehingga Rasio Perbandingan 1 : 1 harus ditingkatkan menjadi 1 : 2 (satu Dusun 2 anggota Linmas) dan dibutuhkan pelatihan Dasar bagi Satuan Perlindungan Masyarakat .

3.1.1.2. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran

Indikator Kinerja : Persentase Kesiapsiagaan dan Penanganan kejadian kebakaran memenuhi standar dan Prosedur

Tabel 3.10

Meningkatnya Kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1 Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran i	Persen	88	14 Kecamatan	87,5

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar UPTD Pemadam kebakaran bergabung dibawah naungan Satpol PP dengan tingkat Eselon IV B terhitung Januari 2022 dengan Jumlah personil Damkar 97 Orang terdiri 4 orang PNS dan 93 Orang Non PNS .

Jumlah Kendaraan Pemadam yang beroperasi sebanyak 7 unit jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2022 adalah 120.137 Ha dengan 14 Kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Polewali
2. Kecamatan Binuang
3. Kecamatan anreapi



4. Kecamatan Matakali
5. Kecamatan Tapango
6. Kecamatan Mapilli
7. Kecamatan Campalagian
8. Kecamatan Luyo
9. Kecamatan Tinambung
10. Kecamatan Balanipa
11. Kecamatan Limboro
12. Kecamatan Alu
13. Kecamatan Bulu
14. Kecamatan Wonomulyo

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit 46 Kali tertangani semua .

Tabel 3.11

Cakupan pelayanan bencana kebakaran wilayah kabupaten

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Ha	120.137	120.137	120.137	120.137	120.137
2	Luas Wilayah kabupaten	Ha	202.230	202.230	202.230	202.230	202.230
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		%	48%	59%	59%	59%	59%

Tabel 3.12

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	kali	40	45	73	20	19	46
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	kali	40	45	73	23	22	46
Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK			100%	100%	100%	100%	86,9%	100%



**Gambar 27 .
Penanggulangan Bencana Kebakaran**



**Tabel 3.13
Daftar Sarana dan Prasarana Pemadaman
UPTD Pemadam Kebakaran
Kabupaten Polewali Mandar**

NO	NAMA SARANA	JUMLAH	KET
1.	Armada Mobil Kebakaran	7 Unit	
2	APAR	11 Unit	
3	Alcon Pengisapan Air	3 Unit	
4	Alat Pemadam Portabel	6 Unit	

5	Selang Air	9 Unit	
6	Nozzel	8 Unit	
7	Baju anti Panas	6 Unit	
8	Sepatu Anti Panas	6 Unit	
9	Helm Anti Panas	6 Unit	
10	Baju anti api	5 Unit	
11	Handy Talky	9 Unit	
12	Set Tabung Oxigen	2 Unit	
13	Masker O2/Asap	4 buah	

Gambar 28
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kaebakaran Kab.Polewali Mandar Tahun 2022



Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Indikator 2 :

Faktor Penghambat pencapaian indikator 2 adalah :

- 1. Kurangnya Fasilitas Armada Pemadam Kebakaran untuk Operasional dan Penempatan di Setiap Kecamatan*
- 2. Tenaga Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran masih kurang untuk memenuhi Kuota di Kecamatan*
- 3. Tenaga PNS Pemadam Kebakaran Cuma 4 orang.*

Berdasarkan beberapa faktor Penghambat Target kinerja pada indicator 2 diatas maka UPTD pemadam Kebakaran Kab.Polewali Mandar melaksanakan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan sasaran Program Meningkatnya kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran Capain Indikator Persentase kecamatan dengan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran memadai target 94% .



Tabel 3.14

Program Kegiatan UPTD Pemadam kebakaran Tahun 2022

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Ket
			4	9 = (5+6+7+8)	10 = 9/4x100	11			
1	2	3	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
III.	Program : PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	94%	2,367,688,600	100%	2,365,630,000	20	298	
1.	Kegiatan : Pencegahan Pengendalian ,Pemadaman , Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Tindakan Pencegahan ,Pengendalian ,Pemadaman ,Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten /kota	25 Kali	2,367,688,600	56 Kali	2,365,630,000	25	298	
1.1	Sub Kegiatan : Pemadamana dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten kota	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	14 Kecamatan	2,237,337,000	14	2,237,218,400	25	100	
1.2	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan ,Penaggulangan Kebakaran dan alat plidung diri	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Perlengkapan operasional Pemadam Kebakaran	14 Jenis	93,465,600	14	91,525,600	100	98	
1.3	Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta Pelatihan Pemadam Kebakaran	30 Orang	36,886,000	30	36,886,000	100	100	
Predikat Kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	



3.1.1.3. Capaian Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

- Indikator Kinerja 3 :
1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah
 2. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan asset perangkat daerah
 3. Indeks kepuasan Pengguna pelayanan public perangkat daerah

3.1.1.3.1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan beberapa faktor , Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi **Akuntabilitas Kinerja** Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Penyusunan RENSTRA, RENJA , Perjanjian Kineja, SAKIP dan LAKIP
2. Pemantauan Pencapaian kinerja secara berkala
3. Memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun

Untuk Pengelolaan akuntabilitas Kinerja sangat perlu adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala .

diharapkan disiplin kerja petugas Satpol PP akan meningkat, sehingga pelaksanaan pengukuran Kinerja berjalan dengan baik.

Peredikat SAKIP Satpol PP Tahun 2022 adalah BB dengan nilai 77,76

Tabel 3.15

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Peredikat SAKIP Perangkat daerah	Predikat	B	BB	100



Untuk mencapai Indikator Kinerja diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Program Penujang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota Pada satu kegiatan Yaitu Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Pagu Rp.14.408.100,- realisasi 100% Perbandingan capaian Indikator tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.16

Capaian Indikator Perencanaan dan pelaporan Tahun 2021 dan 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen
3.	Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan
4.	Meningkatnya kualitas penyusunan LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah	jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 Laporan	3 Laporan

Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 3 Indikator 1 :

Adapun factor penghambat pencapaian Target Kinerja Sasaran strategis 3 Indikator 1 adalah :

1. Lambatnya pengumpulan data Pendukung dari Setiap Bidang tehnis pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap penyusunan Laporan SAKIP , LPPD dan laporan Lainnya
2. Masih Kurangnya Perhatian Keterlibatan Unsur pimpinan pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan dokumen Pendukung SAKIP



3.1.1.3.2 Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan perangkat daerah Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengelolaan keuangan dana aset perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 mendapatkan opini WTP dengan Capaian 100% dibuktikan dengan tidak adanya temuan terkait perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan selama satu tahun pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 3.17

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase Tertib Pengelolaan keuangan dana aset perangkat daerah	Persen	100%	100%	100

Untuk mencapai Indikator Kinerja diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Satu Program Penujang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota Pada satu kegiatan Yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Jumlah Pagu Rp.9.456.549.472- realisasi Rp. 9.180.251.502,- atau 100%. Kemudian diurai pada 3 Sub kegiatan dengan capaian Indikator Kinerja sub Kegiatan .

Perbandingan capaian Indikator tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.18

capaian Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tujangannnya	115 Orang	117 Orang
2.	Meingkatkan Tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah	Jumlah SPM yang diterbitkan	130 Dokumen	151 Dokumen
3.	Meningkatnya Kalitas Penyusunan Laporan Prognosis Relisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	19 Dokumen	19 Dokumen



Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 3 Indikator 2:

1. Aplikasi Pengelolaan Keuangan masih dalam proses Pembelajaran sehingga Pengelolaan Keuangan melalui aplikasi sering terhambat
2. Ada 2 aplikasi SIPD dan SIMDA yang digunakan dalam proses pengelolaan Keuangan baik perencanaan dan Akutansi sehingga membuat OPD kewalahan .

3.1.1.3.3. Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan perangkat daerah Indikator Kinerja Indeks Kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 mendapatkan Predikat Baik dengan Capaian 100%.

Tabel 3.19

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1 Indeks Kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah	Predikat	Baik	Baik	100

Untuk mencapai Indikator Kinerja diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Satu Program Penujang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota Pada lima kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 3.20

Program Kegiatan Pelayanan Publik Tahun 2022

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2022 (%)		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1	2	3	4		9 = (5+6+7+8)		10 = 9/4x100		11
1	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah ; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah ; Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	BB; WTP; Baik	12,192,103,072	BB; WTP; Baik	11,891,930,202	98		
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS Perangkat daerah yang bernierja baik	100%	47,532,200	80	47,523,400	0	200	
3.1	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Panilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pejabat Fungsional Satpol PP yang dinilai	20 Orang	26,409,100	12	26,409,100	100	100	
3.2	Sub Kegiatan : Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Jabatan fungsional	20 Orang	21,123,100	20	21,114,300	100	100	
4.	Kegiatan : Administarsi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	270,779,040	100	269,776,100	21	590	
4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia	34 Unit	1,480,000	34	1,479,000	56	100	
4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan bahan ,alat kebersihan yang tersedia	35 Jenis	12,860,140	35	12,859,900	17	100	
4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis makanan minuman dan Logistik Satpol PP	12 Bulan	42,282,000	12	42,262,000	25	100	
4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	8 Jenis	4,610,400	8	4,610,400	100	100	



4.6	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 Bulan	4,440,000	100	4,020,000	17	91	
4.7	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi Dalam daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	79 Laporan	205,106,500	79	204,544,800	10	100	
5.	Kegiatan : Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	34,165,800	100	34,165,800	0	200	
5.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis kelengkapan komputer/note book yang tersedia	3 unit	32,023,200	3	32,023,200	100	100	
5.2	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis perelengkapan gedung kantor	4 jenis	2,142,600	4	2,142,600	100	100	
6.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib ketatausahaan Kantor	100%	2,207,823,460	172	2,200,305,500	59	400	
6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang dikelola	352 Surat	1,138,000	830	1,138,000	64	100	
6.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	12 Bulan	13,285,460	12	13,267,500	100	100	
6.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 Unit	15,400,000	12	15,400,000	100	100	
6.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Bantu Satpol PP	121 Orang /12 bulan	2,178,000,000	12	2,170,500,000	25	100	
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Saran dan Prasaran kantor Kondisi Baik	100%	160,845,000	100	145,500,200	17	282	
7.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas satpol PP dan damkar yang terbayarkan pajaknya serta operasional pemeliharaan	12 unit	83,388,400	12	68,058,400	25	82	
7.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang terpelihara	5 jenis	904,800	5	904,800	100	100	
7.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	504 M2	76,551,800	504	76,537,000	100	100	
Predikat Kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	



Perbandingan capaian Indikator tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.21

Capaian Indikator Pelayanan Publik Tahun 2021 dan 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola	356 Surat	352 Surat
2.	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	6 Unit	9 Unit
4.	Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor	Luas Gedung dan halaman kantor kondisi bersih	504 m2	504 m2
5.	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	35 Jenis	38 Jenis
6.	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis
7.	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia	14 Jenis	55 Jenis
8.	Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga	Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia	46	46 Jenis
9.	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	Jumlah makan minum yang tersedia	1 Jenis	3 Jenis
10.	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	35 Laporan	51 Laporan
11.	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20 Laporan	25 Laporan
12.	Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor	Jumlah jenis mebeleur	6 Jenis	6 Jenis



13.	Terpenuhinya kebutuhan alat studio dan komunikasi	Jumlah jenis alat studio dan komunikasi yang tersedia	8 Jenis	8 Jenis
14.	Terpenuhinya kebutuhan komputer PC/ Note Book dan kelengkapannya	Jumlah unit komputer PC/ notebook	10 Unit	10 Unit
15.	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	504 m2	504 m2
16.	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional secara rutin/berkala	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	4 Unit	7 Unit
17.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 Unit	20 Unit
18.	Terpeliharanya mebeleur secara rutin/ berkala	Jumlah jenis mebeleur yang terpelihara	-	8 Jenis
19.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi , pageduan dan apirasi publik	Jumlah jenis layanan yang terkelola	-	3 Jenis
20.	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	-	1541 Pasang
21.	Meningkatnya kompetensi pegawai	Jumlah Pegawai yang menyelesaikan, pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	-	5 Orang
22.	Meningkatnya kualitas penataan administrasi kepegawaian	Jumlah jenis Administrasi Kepegawaian yang terkelola dengan tertib	5 Jenis	5 Jenis
23.	Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan Per Undang Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	3 Jenis	3 Jenis
24.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	20 Jenis	20 Jenis
25.	Terpenuhinya kebutuhan Penagamanan Kantor	Jumlah tenaga Bantu Satpol PP	120 orang	120 orang

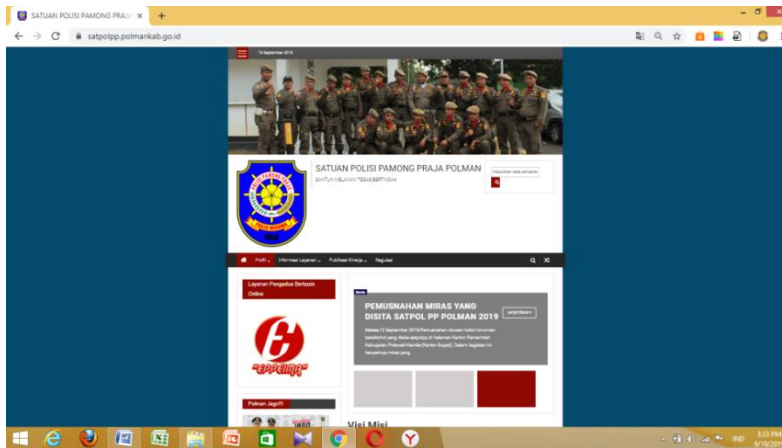


Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan Predikat Baik:

3. Satpol PP masuk 10 OPD Percotohan yang pada 8 Penilaian Reformasi Birokrasi
4. Dala mewujudkan Pelayanan publik yang baik Satpol PP membuka Pengaduan Masyarakat melalui media sosial seperti website Satpol PP :
satpolpp.polmankab.go.id maupun Via Whatapp .

Keterbukaan Informasi Publik sangat didukung dengan Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik dan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala salat Satu bukti Keterbukaan informasi publik pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah kegiatan yang telah dilaksanakan Satpol PP dan Damkar dipublikasi secara umum melalui beberapa media sosial seperti

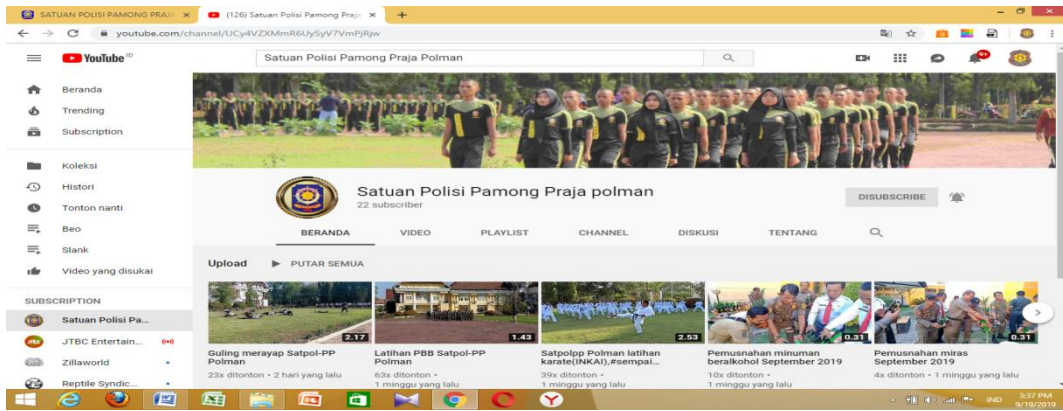
➤ Website (satpolpp.polmankab.go.id)



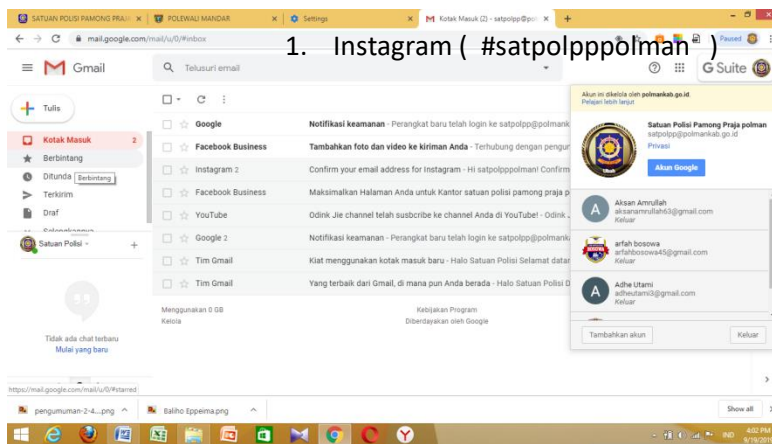
➤ Facebook (Satuan Polisi Pamong Praja Polman) .



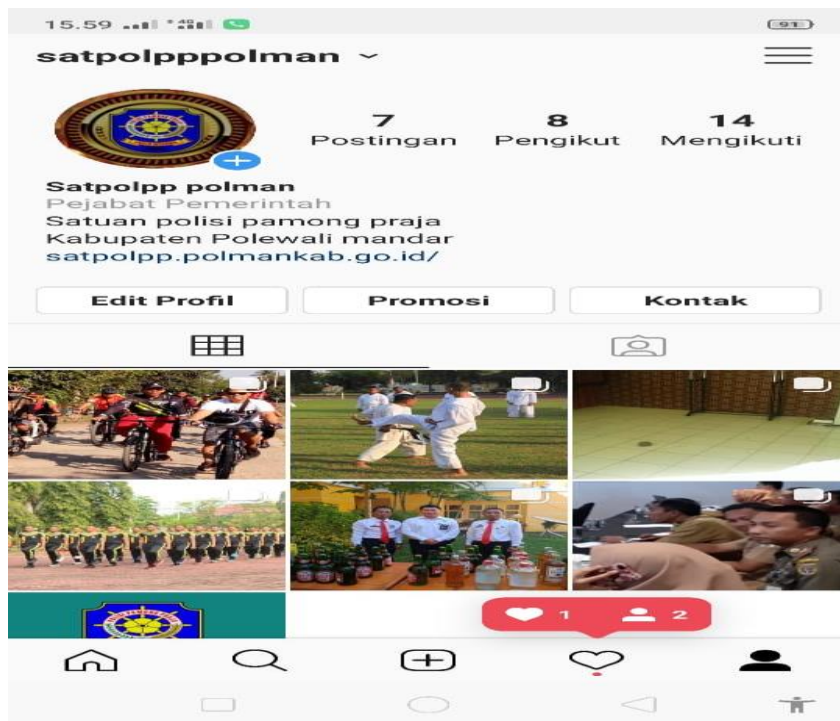
➤ Youtube (Satuan Polisi Pamong Praja Polman)



➤ Email (satpolpp@polmankab.go.id)



➤ Instagram



3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Satuan Polisi Pamong Praja menyajikan capaian realisasi anggaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022. Pada dasarnya Akutabilitas keuangan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mempertanggungjawabkan capaian kinerja terhadap pengelolaan dan pengendalian keuangan.

Pada Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar mempunyai pagu Anggaran Belanja sebesar Rp15,042,011,872,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program dan 11 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan . Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp14,739,473,302,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan capaian keuangan sebesar 97,9%, terjadi penurunan pagu dibanding tahun 2021 dengan pagu sebesar Rp16.157.166.504.. Dalam pencapaian realisasi fisik terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 yang realisasinya 96,9 % menjadi 97.9 % ditahun 2022 . Sebagai gambaran dapat dilihat secara rinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.22


Belanja Aparatur Tahun 2021

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Alokasi (%)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 9.333.016.504	Rp 8.833.513.563	94,6
2	Belanja Langsung	Rp6.824.150.000	Rp6.776.683.975	99,3
Total Belanja Aparatur		Rp16.157.166.504	Rp15.610.197.538	96,6



Dari tabel dapat kita jelaskan bahwa Belanja Langsung direncanakan Rp Rp6.824.150.000,-terrealisasi sebesar Rp6.776.683.975,-atau Persentase Alokasi sebesar 99.3%, sedangkan sisanya adalah belanja tidak langsung direncanakan Rp. 9.333.016.504,-terrealisasi sebesar Rp.8.833.513.563,- atau Persentase Alokasi sebesar 94.6%

Laporan Keuangan Satpol PP Tahun 2022

 PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021					
Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SKPD : 1-05.0-00.0-00.14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.14.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.14.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	15.042.011.872,00	14.739.473.302,00	97,99	15.609.525.538,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.981.797.872,00	14.679.259.302,00	97,98	13.143.157.638,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.456.845.872,00	9.179.196.502,00	97,06	8.849.541.563,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.524.952.000,00	5.500.062.800,00	99,55	4.293.616.075,00
5.2	BELANJA MODAL	60.214.000,00	60.214.000,00	100,00	2.466.367.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.214.000,00	60.214.000,00	100,00	2.466.367.900,00
	SURPLUS / DEFISIT	(15.042.011.872,00)	(14.739.473.302,00)	0	(15.609.525.538,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(15.042.011.872,00)	(14.739.473.302,00)	0	(15.609.525.538,00)





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 SKPD : 1-05.0-00.0-00.14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.14.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Sub Unit Organisasi : 1-05.0-00.0-00.14.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	BEBAN DAERAH	14.679.259.302,00	13.579.850.320,00	1.099.408.982,00	8,14
8.1	BEBAN OPERASI	14.679.259.302,00	13.148.871.899,00	1.530.387.403,00	11,64
8.1.01	Beban Pegawai	9.179.196.502,00	8.855.255.824,00	323.940.678,00	3,66
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.500.062.800,00	4.293.616.075,00	1.206.446.725,00	28,10
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	430.978.421,00	(430.978.421,00)	-100,00
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	399.064.421,00	(399.064.421,00)	-100,00
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	31.914.000,00	(31.914.000,00)	-100,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(14.679.259.302,00)	(13.579.850.320,00)	(1.099.408.982,00)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(14.679.259.302,00)	(13.579.850.320,00)	(1.099.408.982,00)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.679.259.302,00)	(13.579.850.320,00)	(1.099.408.982,00)	0

Polewali, 24 Januari 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ARIFIN HALIM, S.Sos, M.Si
 NIP. 196703192000121003





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 1-05.0-00.0-00.14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Unit : 1-05.0-00.0-00.14.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit : 1-05.0-00.0-00.14.000.0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	4.391.896.939,00	2.362.534.221,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.679.259.302,00)	(13.579.850.320,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(312.500,00)	(312.500,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	14.747.946.712,00	15.609.525.538,00
EKUITAS AKHIR	4.460.271.849,00	4.391.896.939,00

Polewali, 24 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ARIFIN HALIM, S.Sos, M.Si
NIP. 196703192000121003





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NERACA
 Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 1-05.0-00.0-00.14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Unit : 1-05.0-00.0-00.14.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Sub Unit : 1-05.0-00.0-00.14.000.0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	15.520.960,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	15.520.960,00	0,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	4.728.485.600,00	4.868.271.600,00
Gedung dan Bangunan	1.566.700.000,00	1.566.700.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.889.360.400,00)	(1.889.360.400,00)
JUMLAH ASET TETAP	4.434.825.200,00	4.574.611.200,00
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	23.000.000,00	23.000.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	23.000.000,00	23.000.000,00
JUMLAH ASET	4.473.346.160,00	4.397.611.200,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	4.559.150,00	0,00
Utang Belanja	5.714.261,00	5.714.261,00
RK PPKD	14.747.946.712,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.758.220.123,00	5.714.261,00
JUMLAH KEWAJIBAN	14.758.220.123,00	5.714.261,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	4.391.896.939,00	4.391.896.939,00
JUMLAH EKUITAS	4.391.896.939,00	4.391.896.939,00
JUMLAH EKUITAS	4.391.896.939,00	4.391.896.939,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19.150.117.862,00	4.397.611.200,00



Dari tabel dapat kita jelaskan bahwa Belanja Langsung direncanakan Rp Rp6.824.150.000,-terrealisasi sebesar Rp6.776.683.975,-atau Persentase Alokasi sebesar 99.3%, sedangkan sisanya adalah belanja tidak langsung direncanakan Rp. 9.333.016.504,-terrealisasi sebesar Rp.8.833.513.563,- atau Persentase Alokasi sebesar 94.6%





BAB IV PENUTUP

4.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, pencapaian sasaran yang diinginkan tahun anggaran 2022 sesuai dengan indikator capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 93,75 %. Secara kelembagaan Satpol PP pada tahun 2022 mendapatkan predikat **Wilayah Bebas Korupsi** (WBK), predikat ini dicapai karena tidak ada temuan kerugian negara selama 2 tahun berturut-turut pada Satuan Polisi Pamong Praja. Disamping itu, untuk hasil Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Satuan Polisi Pamong Praja menempati posisi urutan kedua diantara SKPD yang ada di Polewali Mandar.

Untuk mencapai Target Kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya komunikasi yang lebih insentif antar SKPD yang menjadi stakeholder dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Sangat dibutuhkan kerjasama dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

4.2. SARAN

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, dibutuhkan dana yang cukup terutama dalam peningkatan SDM anggota dalam penegakan perda.

Selanjutnya untuk optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas lainnya, dibutuhkan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja anggaran 2022.

Polewali, 1 Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



ARIFIN HALIM, S.Sos.MSi

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19670319 200012 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Telp. / Fax (0428) 21422

<http://www.satpolppkabpolewalimandar.blogspot.com/>

POLEWALI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARIFIN HALIM, S.Sos,M.Si**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H.ANDI IBRAHIM MASDAR**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 15 November 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI,MANDAR,

Ttd

H.ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA



ARIFIN HALIM.S.Sos.MSi

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 196703192000121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali	100 %	100%
2.	Meningkatnya Kesipasiagaan dan Penanganan Kebakaran	Persentase kesiapsiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran memenuhi standar dan prosedur	100 %	100 %
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B
		Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 12.192.103.072,-	APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 482.220.200,-	APBD
3.	Program Pencegahan Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 2.367.688.600,-	APBD
Jumlah		Rp. 15.042.011.872,-	

Polewali, 15 November 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI,MANDAR,

Ttd

H.ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA



ARIFIN HALIM.S.Sos.MSi

Pangkat : Pembina TK.I
NIP : 196703192000121003

Lampiran : I

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten : Polewali Mandar
Tahun Anggaran : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali	persen	100
Meningkatnya Kesipasiagaan dan Penanganan Kebakaran	Persentase kesiapsiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran memenuhi standar dan prosedur	persen	100
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Baik



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

ARIFIN HALIM, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19670319 200012 1 003

Lampiran : III

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali	Persen	100%	143 Kasus	100%
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kebakaran	Persentase kesiapsiagaan dan Penanganan Kejadian Kebakaran memenuhi standar dan prosedur	Persen	100%	15 Kecamatan	100%
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Baik	Baik	100%



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

ARIFIN HALIM, S.Sos, MSi

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19670319 200012 1 003

REALISASI ANGGARAN SATPOL PP TAHUN 2022

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	%	SISA PAGU
I	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Rp 12,192,103,072	Rp 11,891,930,202	97.5	Rp 300,172,870
1	1.05.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 14,408,100	Rp 14,407,700	100	Rp 400
1	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 2,147,800	Rp 2,147,800	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp 571,000	Rp 571,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 526,800	Rp 526,800		Rp -
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1,050,000	Rp 1,050,000		Rp -
2	1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp 4,547,900	Rp 4,547,500	99.99	Rp 400
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 283,200	Rp 283,200		Rp -
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Belanja Cetak	Rp 1,184,700	Rp 1,184,300		Rp 400
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 3,080,000	Rp 3,080,000		Rp -
3	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Rp 4,399,900	Rp 4,399,900	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 83,100	Rp 83,100		Rp -
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Belanja Cetak	Rp 256,800	Rp 256,800		Rp -
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 700,000	Rp 700,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 3,360,000	Rp 3,360,000		Rp -
4	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3,312,500	Rp 3,312,500	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 275,900	Rp 275,900		Rp -
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 651,600	Rp 651,600		Rp -
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 2,385,000	Rp 2,385,000		Rp -
2	1.05.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9,456,549,472	Rp 9,180,251,502	97.1	Rp 276,297,970
5	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9,453,445,872	Rp 9,177,156,502	97.1	Rp 276,289,370
	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5,423,305,610	Rp 5,251,626,346		Rp 171,679,264
	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	601,065,882	Rp 580,082,214		Rp 20,983,668
	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175,859,500	Rp 175,220,000		Rp 639,500
	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	87,634,000	Rp 86,520,000		Rp 1,114,000
	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	220,942,750	Rp 218,015,000		Rp 2,927,750
	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	382,240,002	Rp 377,163,360		Rp 5,076,642
	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus PNS	2,329,722	Rp 2,318,125		Rp 11,597
	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	76,934	Rp 76,463		Rp 471
	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	259,399,394	Rp 216,787,363		Rp 42,612,031
	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12,992,688	Rp 10,793,346		Rp 2,199,342
	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	38,977,532	Rp 32,379,531		Rp 6,598,001

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	%	SISA PAGU
	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	1,467,159,702	Rp 1,453,599,833		Rp 13,559,869
	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja PNS	781,462,156	Rp 772,574,921		Rp 8,887,235
6	1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan akutansi SKPD	Rp 1,682,000	Rp 1,674,200	99.5	Rp 7,800
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 127,800	Rp 120,000		Rp 7,800
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Belanja Cetak	Rp 154,200	Rp 154,200		Rp -
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1,400,000	Rp 1,400,000		Rp -
7	1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan analisis Prognosis realisasi Anggaran	Rp 1,421,600	Rp 1,420,800	99.9	Rp 800
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 161,800	Rp 161,000		Rp 800
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 349,800	Rp 349,800		Rp -
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 910,000	Rp 910,000		Rp -
3	1.05.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 47,532,200	Rp 47,523,400	99.98	Rp 8,800
8	1.05.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 26,409,100	Rp 26,409,100	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 1,679,900	Rp 1,679,900		Rp -
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 901,800	Rp 901,800		Rp -
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4,680,000	Rp 4,680,000		Rp -
	5.1.02.02.01.0004	Honorriium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	Rp 14,000,000	Rp 14,000,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 5,147,400	Rp 5,147,400		Rp -
9	1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Rp 21,123,100	Rp 21,114,300	99.96	Rp 8,800
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 1,734,900	Rp 1,734,900		Rp -
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 2,162,000	Rp 2,153,200		Rp 8,800
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 1,800,000	Rp 1,800,000		Rp -
	5.1.02.02.01.0003	Honorriium Narasumber atau Pembahas Moderator ,Pembawa Acara dan Panitia	Rp 7,800,000	Rp 7,800,000		Rp -
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung tempat Pertemuan	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000		Rp -
	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp 1,155,000	Rp 1,155,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 4,071,200	Rp 4,071,200		Rp -
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 900,000	Rp 900,000		Rp -
4	1.05.01.2.06	Kegiatan : Administarsi Umum Perangkat Daerah	Rp 270,779,040	Rp 269,776,100	99.63	Rp 1,002,940
10	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik & Penerangan bangunan Kantor	Rp 1,480,000	Rp 1,479,000		Rp 1,000
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- alat listrik	Rp 1,480,000	Rp 1,479,000		Rp 1,000
11	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan perlengkapan Kantor	Rp 12,860,140	Rp 12,859,900	100	Rp 240
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 12,188,440	Rp 12,188,200		Rp 240
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Rp 671,700	Rp 671,700		Rp -
12	1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rp 42,282,000	Rp 42,262,000	99.95	Rp 20,000
	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Rp 17,922,000	Rp 17,922,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 15,600,000	Rp 15,580,000		Rp 20,000
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 8,760,000	Rp 8,760,000		Rp -

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	%	SISA PAGU
13	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Rp 4,610,400	Rp 4,610,400	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 4,610,400	Rp 4,610,400		Rp -
14	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang Undangan	Rp 4,440,000	Rp 4,020,000	90.54	Rp 420,000
	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal /Surat kabar/ Majalah	Rp 4,440,000	Rp 4,020,000		Rp 420,000
15	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 205,106,500	Rp 204,544,800	99.73	Rp 561,700
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas biasa	Rp 194,026,500	Rp 193,474,800		Rp 551,700
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	Rp 11,080,000	Rp 11,070,000		Rp 10,000
5	1.05.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang milik daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 34,165,800	Rp 34,165,800	100	Rp -
16	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 32,023,200	Rp 32,023,200	100	Rp -
	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 31,083,400	Rp 31,083,400		Rp -
	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp 939,800	Rp 939,800		Rp -
17	1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Rp 2,142,600	Rp 2,142,600	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 268,000	Rp 268,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0030	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Perabot Kantor	Rp 1,874,600	Rp 1,874,600		Rp -
6	1.05.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2,207,823,460	Rp 2,200,305,500	99.7	Rp 7,517,960
18	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1,138,000	Rp 1,138,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan - bakar dan pelumas	Rp 628,000	Rp 628,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0027	Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor - benda pos	Rp 510,000	Rp 510,000		Rp -
19	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Rp 13,285,460	Rp 13,267,500	99.9	Rp 17,960
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 8,472	Rp -		Rp 8,472
	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telpon,Air dan Listrik	Rp 942,500	Rp 942,500		Rp -
	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp 6,552,000	Rp 6,552,000		Rp -
	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp 5,362,488	Rp 5,353,000		Rp 9,488
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/internet/TV Berlangganan	Rp 420,000	Rp 420,000		Rp -
20	1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 15,400,000	Rp 15,400,000	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000		Rp -
	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor -alat Kantor Lainnya	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000		Rp -
	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan komputer -komputer unit -personal computer	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000		Rp -
	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer -peralatan komputer -Peralatan Personal komputer	Rp 900,000	Rp 900,000		Rp -
21	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Rp 2,178,000,000	Rp 2,170,500,000	99.7	Rp 7,500,000
	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman ,Ketertiban umum , dan perlindungan masyarakat	Rp 2,178,000,000	Rp 2,170,500,000		Rp 7,500,000
7	1.05.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 160,845,000	Rp 145,500,200	90.5	Rp 15,344,800
22	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,paik dan perizinan	Rp 83,388,400	Rp 68,058,400	81.6	Rp 15,330,000
	5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan -bahan bakar dan pelumas	Rp 31,416,000	Rp 31,416,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat angkutan	Rp 5,162,400	Rp 5,160,000		Rp 2,400

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	%	SISA PAGU
	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran pajak, bea dan perizinan	Rp 19,810,000	Rp 4,482,400		Rp 15,327,600
	5.1.02.03.02.0035	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor -kendaraan dinas	Rp 27,000,000	Rp 27,000,000		Rp -
23	1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Rp 904,800	Rp 904,800	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0001	Belanja bahan -bahan bangunan dan konstruksi	Rp 904,800	Rp 904,800		Rp -
24	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rp 76,551,800	Rp 76,537,000	99.98	Rp 14,800
	5.1.02.01.01.0001	Belanja bahan -bahan bangunan dan konstruksi	Rp 57,879,300	Rp 57,865,000		Rp 14,300
	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana umum	Rp 8,822,500	Rp 8,822,000		Rp 500
	5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	Rp 5,850,000	Rp 5,850,000		Rp -
	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa alat Besar Darat Lainnya	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000		Rp -
II	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 482,220,200	Rp 481,913,100	99.9	Rp 307,100
8	1.05.02.2.01	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota	Rp 418,388,400	Rp 418,101,100	99.9	Rp 287,300
25	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dan cegah	Rp 20,305,700	Rp 20,305,700	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 1,874,000	Rp 1,874,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Bahan cetak	Rp 641,600	Rp 641,600		Rp -
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor	Rp 690,100	Rp 690,100		Rp -
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman Rapat	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 12,600,000	Rp 12,600,000		Rp -
26	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda	Rp 298,560,000	Rp 298,275,600	99.9	Rp 284,400
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 247,700	Rp 247,700		Rp -
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 31,320,000	Rp 31,290,000		Rp 30,000
	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp 21,500,000	Rp 21,375,000		Rp 125,000
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 29,492,300	Rp 29,362,900		Rp 129,400
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 216,000,000	Rp 216,000,000		Rp -
27	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlidungan	Rp 15,269,600	Rp 15,267,600	99.99	Rp 2,000
	5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	Rp 942,000	Rp 940,000		Rp 2,000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Bahan cetak	Rp 697,600	Rp 697,600		Rp -
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3,150,000	Rp 3,150,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Jasa tenaga Ahli	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 6,480,000	Rp 6,480,000		Rp -
28	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban	Rp 14,493,700	Rp 14,492,800	99.99	Rp 900
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -alat tulis kantor	Rp 713,900	Rp 713,000		Rp 900
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Bahan cetak	Rp 1,429,800	Rp 1,429,800		Rp -
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan minuman jamuan tamu	Rp 1,620,000	Rp 1,620,000		Rp -
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembina ,moderator,pembawa acara dan panitia	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000		Rp -
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan gedung termpat pertemuan	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000		Rp -

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	%	SISA PAGU
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 6,230,000	Rp 6,230,000		Rp -
29	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan	Rp 54,742,300	Rp 54,742,300	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -alat tulis kantor	Rp 2,080,000	Rp 2,080,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Bahan cetak	Rp 2,469,800	Rp 2,469,800		Rp -
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 12,150,000	Rp 12,150,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian olahraga	Rp 4,200,000	Rp 4,200,000		Rp -
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembina ,moderator,pembawa acara dan panitia	Rp 13,300,000	Rp 13,300,000		Rp -
	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa tenaga Ahli	Rp 11,700,000	Rp 11,700,000		Rp -
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan gedung termpat pertemuan	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan dinas biasa	Rp 1,342,500	Rp 1,342,500		Rp -
30	1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan	Rp 15,017,100	Rp 15,017,100	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan Bakar dan pelumas	Rp 942,000	Rp 942,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -alat tulis kantor	Rp 137,100	Rp 137,100		Rp -
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Bahan cetak	Rp 1,490,000	Rp 1,490,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Perabot Kantor	Rp 618,000	Rp 618,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	Rp 340,000	Rp 340,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 1,490,000	Rp 1,490,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Jasa tenaga Ahli	Rp 6,250,000	Rp 6,250,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 3,750,000	Rp 3,750,000		Rp -
9	1.05.02.2.02	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 55,831,800	Rp 55,821,300	99.98	Rp 10,500
31	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati /Walikota	Rp 19,720,200	Rp 19,710,200	99.9	Rp 10,000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Bahan cetak	Rp 520,200	Rp 520,200		Rp -
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2,450,000	Rp 2,450,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 16,750,000	Rp 16,740,000		Rp 10,000
32	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 36,111,600	Rp 36,111,100	100	Rp 500
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -alat tulis kantor	Rp 1,284,400	Rp 1,283,900		Rp 500
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Bahan cetak	Rp 1,177,200	Rp 1,177,200		Rp -
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 200,000	Rp 200,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2,100,000	Rp 2,100,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Jasa tenaga Ahli	Rp 12,600,000	Rp 12,600,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 18,750,000	Rp 18,750,000		Rp -
10	1.05.02.2.03	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp 8,000,000	Rp 7,990,700	99.88	Rp 9,300
33	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp 8,000,000	Rp 7,990,700	99.9	Rp 9,300
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Bahan cetak	Rp 590,400	Rp 590,400		Rp -
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 7,409,600	Rp 7,400,300		Rp 9,300

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	%	SISA PAGU
III	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp 2,367,688,600	Rp 2,365,630,000	99.91	Rp 2,058,600
11	1.05.04.2.01	Kegiatan : Pencegahan Pengendalian ,Pemadaman , Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota	Rp 2,367,688,600	Rp 2,365,630,000	99.91	Rp 2,058,600
34	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota	Rp 2,237,337,000	Rp 2,237,218,400	99.99	Rp 118,600
	5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan Bakar dan pelumas	Rp 66,410,400	Rp 66,410,400		Rp -
	5.1.02.01.01.0009	Belanja bahan isi tabung pemadam kebakaran	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat angkutan	Rp 14,308,000	Rp 14,305,000		Rp 3,000
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -alat tulis kantor	Rp 3,618,400	Rp 3,616,700		Rp 1,700
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Bahan cetak	Rp 1,560,000	Rp 1,560,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Benda Pos	Rp 600,000	Rp 600,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Perabot Kantor	Rp 412,000	Rp 412,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakain dinas Harian (PDH)	Rp 54,000,000	Rp 54,000,000		Rp -
	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakain dinas Lapangan (PDL)	Rp 46,800,000	Rp 46,800,000		Rp -
	5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp 1,792,000,000	Rp 1,792,000,000		Rp -
	5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp 73,968,000	Rp 73,968,000		Rp -
	5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	Rp 8,683,200	Rp 8,683,200		Rp -
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan alat nagkutan -lat angkutan darat bermotor - Kendaraan Dinas	Rp 108,000,000	Rp 108,000,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 30,836,200	Rp 30,722,300		Rp 113,900
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	Rp 4,450,000	Rp 4,450,000		Rp -
	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal alat kantor lainnya	Rp 2,472,000	Rp 2,472,000		Rp -
	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal alat pendingin	Rp 4,389,000	Rp 4,389,000		Rp -
	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal komputer	Rp 7,028,600	Rp 7,028,600		Rp -
	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 9,930,200	Rp 9,930,200		Rp -
	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp 4,371,000	Rp 4,371,000		Rp -
35	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan ,Penanggulangan Kebakaran	Rp 93,465,600	Rp 91,525,600	97.92	Rp 1,940,000
	5.1.02.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	Rp 3,400,000	Rp 2,040,000		Rp 1,360,000
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya	Rp 30,180,000	Rp 29,600,000		Rp 580,000
	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakain dinas Lapangan (PDL)	Rp 39,700,000	Rp 39,700,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 20,185,600	Rp 20,185,600		Rp -
36	1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp 36,886,000	Rp 36,886,000	100	Rp -
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -alat tulis kantor	Rp 938,400	Rp 938,400		Rp -
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan bahan untuk kegiatan kantor -Bahan cetak	Rp 4,543,600	Rp 4,543,600		Rp -
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4,680,000	Rp 4,680,000		Rp -
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembina ,moderator,pembawa acara dan panitia	Rp 18,000,000	Rp 18,000,000		Rp -

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	%	SISA PAGU
	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan gedung tempat pertemuan	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000		Rp -
	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp 924,000	Rp 924,000		Rp -
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	Rp 4,800,000	Rp 4,800,000		Rp -
			Rp 15,042,011,872	Rp 14,739,473,302	97.99	Rp 302,538,570



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

ARIFIN HALIM, S.Sos,MSi

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19670319 200012 1 003

**ANGKA KRIMINALITAS (KASUS)
DIKABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	JENIS KASUS	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembunuhan	4	1	4	3	5
2	Penganiayaan	4	5	52	50	96
3	Kekerasan dalam rumah tangga	37	31	14	6	4
4	Pemerkosaan	3	2	3		2
5	Pencabulan	13	19	3	7	3
6	Penculikan			6		
7	Pencurian dengan kekerasan	3	4	2	5	1
8	Pencurian Biasa	222	214	72	63	42
9	Pencurian Kendaraan bermotor	34	29	18	29	25
10	Pencurian dengan Pemberatan		8	7	1	2
11	Pengrusakan /Penghancuran Barang	29	29	2	7	1
12	Pembakaran dengan sengaja					
13	Narkotika dan Psikotropika	96	83			
14	Penggelapan	63	48	22	19	15
15	Korupsi	3				
16	Kejahatan terhadap ketertiban umum					
		511	473	205	190	196

Jumlah Penduduk (Jiwa)

427,484 432,692 437,662 442,576

Angka kriminalitas

90,377

2020
1
72
1
-
1
1
36
17
-
1
2
2
134

478,534